

**POLEMIK PENYELENGGARAAN PILKADA 2020 DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

**(Analisis Framing pada Portal Media Online Tempo.co dan Kompas.com
Periode Juni-Desember 2020)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :
Akbar Adi Prasetyo
14321036

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

POLEMIK PENYELENGGARAAN PILKADA 2020

DI TENGAH PANDEMI COVID-19

**(Analisis Framing pada Portal Media Online Tempo.co dan Kompas.com Periode
Juni-Desember 2020)**

Disusun oleh

Akbar Adi Prasetyo

14321036

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan
tim penguji skripsi.

Tanggal: 6 Mei 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,



Anang Hermawan, S.Sos, M.A

NIDN 0506067702

LEMBAR PENGESAHAN

POLEMIK PENYELENGGARAAN PILKADA 2020

DI TENGAH PANDEMI COVID-19

(Analisis Framing pada Portal Media Online Tempo.co dan Kompas.com Periode Juni-Desember 2020)

Disusun oleh

Akbar Adi Prasetyo

14321036

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 17 Juni 2021

Dewan Penguji:

1. Anang Hermawan, S.Sos., M.A.

NIDN: 0506067702

2. Narayana Mahendra Prastya, S.Sos., M.A.

NIDN: 0520058402

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Puji Harivanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Adi Prasetyo

No. Mahasiswa : 14321036

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : POLEMIK PENYELENGGARAAN PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Analisis Framing pada Portal Media Online Tempo.co dan Kompas.com Periode Juni-Desember 2020)

Melalui surat ini, menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti plagiasi, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang di junjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya plagiasi atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta , 6 Mei 2021

Yang menyatakan,



Akbar Adi Prasetyo

NIM : 14321036

MOTTO

*“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang beriman”*

(Q.S Ali ‘Imran : 139)

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

Ayah, Ibu dan Adik-adikku tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Alhamdulillahirobbol'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Sholawat serta salam kepada junjungan nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa kesehatan lahir dan batin, sehingga pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan sekarang ini. Meskipun di masa pandemi *COVID-19* seperti ini namun tidak menyurutkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Dalam melakukan penelitian hingga tahap penyelesaian, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu mendengar dan menjawab doa saya, serta memberikan kesehatan, kemudahan dan kesabaran dan segalanya yang tidak bisa dirangkai dalam kata-kata.
2. **Kedua Orang Tua, Ayahanda Sugito dan Ibunda Nur Handayani**, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil. Serta selalu mendoakan saya dengan sepenuh hati.
3. **Bapak Anang Hermawan, S.Sos, M.A.**, selaku dosen pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah membimbing saya dengan tulus dan sabar, memberikan kritik dan juga saran selama pembuatan skripsi.
4. **Segenap Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia** atas ilmu yang telah diberikan selama di bangku perkuliahan.
5. **Segenap Staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia**, atas bantuan dan informasi yang diberikan kepada saya dalam proses penyelesaian Tugas Akhir.
6. **Teman-teman Ilmu Komunikasi 2014**, terima kasih karena telah saling mendukung satu sama lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat berkumpul lagi di lain kesempatan.

7. **Teman-teman Jurnalisme dan Penyiaran**, yang selalu kompak di kelas maupun di luar kelas. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin.
8. **Sahabat-sahabat saya di Jogja**, Agung, Angga, Denisa, Desy, Faisal, Mia, Pandi, Rifky, Rizal, Sandri, terima kasih karena selama ini selalu setia menemani di saat senang maupun sedih dan melaluinya bersama-sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin.
9. **Serta pihak lainnya**, yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki, kebahagiaan dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam pengembangan di masa yang akan datang dan mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Amin.

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Tarakan, 6 Mei 2021



Akbar Adi Prasetyo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Akademik	iv
Halaman Motto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Abstraksi	xi
Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1) Manfaat Teoritis.....	4
2) Manfaat Praktis	5
E. Tinjauan Pustaka	5
1) Penelitian Terdahulu	5
2) Kajian Teori.....	8
a. Fungsi Media di Tengah Demokrasi dan Kebebasan Informasi	8
b. Media Framing dan Kecenderungan Pemberitaan	9
c. Metode Analisis Framing.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
1) Paradigma Penelitian.....	11
2) Objek Penelitian.....	11

3) Teknik Pengumpulan Data	11
4) Teknik Analisis Data.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM	13
A. Profil Media Online Tempo.co	13
1) Sejarah Singkat	13
2) Berita Tempo.co Mengenai Pilkada di Tengah Pandemi	14
B. Profil Media Online Kompas.com.....	16
1) Sejarah Singkat	16
2) Berita Kompas.com Mengenai Pilkada di Tengah Pandemi	17
C. Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19	19
BAB III TEMUAN PENELITIAN.....	21
A. Analisis Pemberitaan Tempo.co.....	21
B. Analisis Pemberitaan Kompas.com.....	54
BAB IV PEMBAHASAN	87
A. Hasil Pembahasan.....	87
B. Tabel Perbandingan Antara Kedua Media Online	91
1) Framing Kebijakan COVID-19 Periode Juni-Desember 2020.....	91
2) Perbandingan Antara Kedua Media	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	98
B. Keterbatasan Penelitian	99
1) Keterbatasan Objek Penelitian.....	99
2) Keterbatasan Metode.....	99
C. Rekomendasi	99
1) Rekomendasi Akademik	99
2) Rekomendasi Praktis.....	100
3) Rekomendasi Sosial	100
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perangkat Framing Pan & Kosicki	17
TABEL 2.1 Berita Tempo.co	20
TABEL 2.2 Berita Kompas.com	23
TABEL 3.1 Analisis Berita 1 Pemberitaan Tempo.co.....	26
TABEL 3.2 Analisis Berita 2 Pemberitaan Tempo.co.....	30
TABEL 3.3 Analisis Berita 3 Pemberitaan Tempo.co.....	33
TABEL 3.4 Analisis Berita 4 Pemberitaan Tempo.co.....	36
TABEL 3.5 Analisis Berita 5 Pemberitaan Tempo.co.....	39
TABEL 3.6 Analisis Berita 6 Pemberitaan Tempo.co.....	43
TABEL 3.7 Analisis Berita 7 Pemberitaan Tempo.co.....	46
TABEL 3.8 Analisis Berita 8 Pemberitaan Tempo.co.....	49
TABEL 3.9 Analisis Berita 9 Pemberitaan Tempo.co.....	52
TABEL 3.10 Analisis Berita 10 Pemberitaan Tempo.co.....	56
TABEL 3.11 Analisis Berita 11 Pemberitaan Kompas.com.....	59
TABEL 3.12 Analisis Berita 12 Pemberitaan Kompas.com.....	62
TABEL 3.12 Analisis Berita 13 Pemberitaan Kompas.com.....	65
TABEL 3.14 Analisis Berita 14 Pemberitaan Kompas.com.....	68
TABEL 3.15 Analisis Berita 15 Pemberitaan Kompas.com.....	71
TABEL 3.16 Analisis Berita 16 Pemberitaan Kompas.com.....	74
TABEL 3.17 Analisis Berita 17 Pemberitaan Kompas.com.....	79
TABEL 3.18 Analisis Berita 18 Pemberitaan Kompas.com.....	81
TABEL 3.19 Analisis Berita 19 Pemberitaan Kompas.com.....	84
TABEL 3.20 Analisis Berita 20 Pemberitaan Kompas.com.....	87
TABEL 4.1 Framing Kebijakan COVID-19 Periode Juni-Desember 2020.....	98
TABEL 4.2 Perbandingan Antara Kedua Media.....	102

ABSTRAKSI

Akbar Adi Prasetyo. 14321036. Polemik Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 (Analisis Framing pada Portal Media Online Tempo.co dan Kompas.com Periode Juni-Desember 2020). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2021.

Sikap Pemerintah yang tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus COVID-19 menuai polemik, baik itu di kalangan masyarakat maupun media massa. Selain karena pandemi masih berlangsung, konsep Pilkada sendiri sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah, yaitu *Social Distancing/Physical Distancing*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media massa khususnya media online dalam membingkai berita terkait polemik Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Media online yang diteliti ada dua yaitu Tempo.co dan Kompas.com.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing dari model *Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki*. Peneliti mengambil data pemberitaan terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dari dua portal media online, yaitu Tempo.co dan Kompas.com periode Juni – Desember 2020. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menyeleksi artikel berita yang relevan dengan topik penelitian dan menganalisisnya dengan perangkat framing model *Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki*.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, baik Tempo.co maupun Kompas.com memiliki kecenderungannya masing-masing. Perbedaan pandangan kedua media online terlihat dari gaya pengemasan berita. Tempo.co lebih cenderung mengisahkan berbagai macam penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada karena mengancam keselamatan masyarakat Indonesia. Sedangkan Kompas.com mengisahkan bahwa penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi adalah sebagai upaya pemerintah menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Pilkada, Pandemi, Analisis Framing, Media Online, COVID-19

ABSTRACT

Akbar Adi Prasetyo. 14321036. Polemic of The 2020 Regional Elections in The Midst of The COVID-19 Pandemic (Framing Analysis on Online Media Portals Tempo.co and Kompas.com June-December 2020 editions). Bachelor's Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia. 2021.

The gesture of the Government which continues to hold Regional Head Elections (Pilkada) in the midst of the COVID-19 virus pandemic has resulted in polemics both among the public and the mass media. Apart from the fact that the pandemic is still ongoing, the concept of Pilkada itself is very contradictory to the policies that have been issued by the Government, namely Social Distancing / Physical Distancing. Therefore, this study aims to find out how mass media, especially online media, frame news related to the Pilkada polemic which was held in the midst of the COVID-19 pandemic. There are two online media studied, namely Tempo.co and Kompas.com.

This study uses a qualitative approach with the framing analysis method of the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki models. Researchers took news data related to the implementation of regional elections in the midst of the COVID-19 pandemic from two online media portals, namely Tempo.co and Kompas.com June - December 2020 editions. Data analysis techniques were carried out by selecting news articles relevant to the research topic and analyzing them with the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki model of framing devices.

This research concludes that both Tempo.co and Kompas.com have their own tendencies. The difference between the views of the two online media can be seen from the style of news packaging. Tempo.co tends to describe various kinds of rejection of the Pilkada because it threatens the safety of the Indonesian people. Meanwhile, Kompas.com reported that the implementation of the Pilkada in the midst of a pandemic was an attempt by the government to save Indonesia's democracy.

Keywords: Regional Elections, Pandemic, Framing Analysis, Online Media, COVID-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tahun 2020 lalu dilaksanakan pesta demokrasi serentak se-Indonesia yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah. Namun faktanya, Pilkada serentak se-Indonesia yang dilaksanakan pada bulan desember 2020 ini sempat menimbulkan polemik karena penyelenggaraannya yang beresiko tinggi akibat wabah virus *COVID-19*. Marisal dkk (2020) mengatakan bahwa, Pandemi *COVID-19* berdampak besar pada kehidupan sosial dan politik Indonesia. Contohnya, dalam kehidupan sosial, virus *COVID-19* benar-benar telah mengubah gaya hidup sosial masyarakat Indonesia melalui pembatasan kontak fisik dan pemberlakuan pembatasan sosial berkala besar di beberapa tempat. Tentunya dengan adanya aturan tersebut, publik diminta untuk lebih berhati-hati dalam beraktifitas di luar ruangan, misalnya menghindari kerumunan atau tempat-tempat ramai. Akan tetapi, aturan tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang saat itu memilih untuk menyelenggarakan agenda nasional yaitu Pilkada serentak.

Publik kecewa dengan sikap Pemerintah yang lebih mementingkan agenda Pilkada dibandingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun sangat bersikeras untuk tetap menyelenggarakan Pilkada padahal kasus positif *COVID-19* belum sepenuhnya mereda. (Sumber: Tempo.co <https://bit.ly/3j767D4>) Pemerintah dinilai tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri salah satunya kebijakan PSBB, yang mana pada kebijakan tersebut publik dihimbau untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Dengan diselenggarakannya Pilkada maka sangat berlawanan dengan logika publik. Karena, yang menjadi perhatian publik disini adalah tahapan-tahapan Pilkada yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan massa dan melanggar ketentuan protokol kesehatan, misalnya saja pada tahapan kampanye. Selain itu resiko penularan juga sangat tinggi ketika berada di Tempat Pemungutan Suara. Meskipun nantinya tetap dilakukan dengan protokol kesehatan, bukan menjadi jaminan penularan virus *COVID-19* tidak terjadi.

Virus *COVID-19* sendiri sudah merebak sejak awal tahun 2020, namun penanganan pemerintah sampai hari ini masih dinilai masih belum maksimal. Palsanya, virus ini menyebar dengan cepat karena media penularannya mudah, bisa melalui kontak fisik atau melalui udara. Karena itu, penemuan kasus pasien virus

COVID-19 kian minggu terus meningkat, peningkatan kasus juga diikuti dengan meningkatnya korban jiwa. Penyebaran virus *COVID-19* dan berbagai respon pemerintah dalam menanganinya mungkin berdampak signifikan pada apa yang disebut sebagai Siklus Pemilu, atau serangkaian langkah dan proses yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu (Landman & Splendore, 2020). Untuk itu pemerintah semestinya lebih mengkaji lagi resiko yang akan diterima ketika menyelenggarakan agenda nasional seperti Pilkada serentak. Karena situasi yang seperti sekarang sangat tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan agenda yang memancing massa berkerumun di satu tempat. Terlebih lagi, pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia, maka wajar rasanya jika publik geram dengan keputusan pemerintah yang tetap menyelenggarakan pilkada ditengah-tengah pandemi virus *COVID-19* seperti ini. Padahal, wacana kesehatan dan keselamatan publik banyak ditemukan di pelbagai pemberitaan nasional, baik di media mainstream maupun media online.

Media massa pun banyak menyoroti langkah pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan di masa pandemi ini. Dalam hal ini, media massa memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik terhadap suatu isu. Media massa adalah instrumen yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan dengan memanfaatkan alat-alat komunikasi contohnya koran, film, radio, dan televisi (Cangara, 2010:173). Selain itu media massa juga dapat membantu memberikan informasi kepada publik untuk bisa memahami isu yang sedang hangat atau isu kontroversi. Seperti isu Pilkada yang sedang menjadi polemik karena tetap dilaksanakan di tengah-tengah krisis pandemi virus *COVID-19*. Peran media dalam menyampaikan edukasi melalui informasi politik membuat masyarakat lebih sadar akan kegiatan demokrasi, sehingga media sangat menjadi penting dalam proses demokrasi. Informasi memiliki bidang yang sangat luas dan beragam. Media disepakati sebagai alat penting karena dapat membentuk dan mengarahkan opini masyarakat. (Djoko S, 2014:137).

Penulis menganalisis pemberitaan tentang Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi pada portal media online. Media online sendiri merupakan media baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Portal media online dipilih selain karena kecepatan informasi, juga karena kemudahan akses yang diberikan. Sehingga penulis dapat mengakses lebih mudah dan cepat untuk memilih

berita yang sesuai untuk dianalisis. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *AC Nielsen*, jumlah pembaca media online di Indonesia meningkat pesat sejak empat tahun belakangan. Data yang dihimpun *Nielsen* pada bulan Agustus 2020 pun membuktikan bahwa jumlah pembaca portal media online di Indonesia sudah mencapai 6 juta orang dan mampu mengalahkan jumlah pembaca media cetak yang mencapai 4,5 juta orang. (Sumber: Katadata.co.id <https://bit.ly/2UmQTze>) Dengan data tersebut, penulis dapat berasumsi bahwa media online saat ini menjadi media yang paling sering diperhatikan oleh publik.

Portal Berita Online yang ingin diteliti adalah *Tempo.co* dan *Kompas.com*. mengapa kedua portal berita online tersebut? *Tempo.co* adalah media massa yang sudah terkenal reputasinya dalam mengkritik Pemerintah, terutama di media cetak. Mulanya *Tempo* adalah media yang mendukung Pemerintah di awal masa kepemimpinan Suharto, namun berangsur-angsur tulisan *Tempo* terhadap Pemerintah menjadi semakin kritis. *Tempo* terkenal dengan jurnalisme investigasinya, selain itu di luar negeri pun *Tempo* dikenal sebagai media yang demokratis dan progresif (Keller, 2009:57)

Kecenderungan *Tempo.co* dalam mengkritik pemerintah membuat penulis ingin mengulik lebih dalam tentang pemberitaan-pemberitaan yang disajikan. Salah satu contoh artikel pemberitaan yang memuat tentang Pilkada di tengah pandemi yang ditulis oleh *Tempo.co*, edisi 28 September 2020, dalam rubrik Fokus yang berjudul "Pilkada 2020: Tambal Sulam Aturan Melarang Kerumunan". Dalam artikel berita tersebut dikatakan bahwa, meskipun telah memberikan aturan baru terkait kampanye Pilkada agar mematuhi protokol kesehatan, namun nyatanya masih banyak pasangan calon yang kedapatan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan. *Tempo* kemudian menyorot ketidaktegasan aturan baru Pilkada 2020 yang tidak tegas terhadap pasangan calon yang melanggar.

Tempo juga memosisikan diri sebagai media yang bebas, dalam artian *Tempo* tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak-pihak tertentu atau yang berhubungan langsung dengannya. Keller (2009) menjelaskan bahwa, ada semacam nilai yang mengarah ke nilai idealisme dari sebuah pers yang bisa jadi amat bebas di Indonesia. Hal tersebut karena *Tempo* dimiliki oleh publik yang tidak terkonsentrasi pada satu tangan seperti media-media lain di Indonesia. Misalnya, saat Ciputra, yang saat itu juga merupakan komisaris *Tempo*, meminta pihak redaksional agar

menghentikan laporan investigatif terkait proyek reklamasi di Jakarta Utara yang melanggar peraturan Perda dan mengotori lingkungan. Namun pihak redaksional menolak intervensi tersebut dan tetap melanjutkan investigasinya. Menurut Pemimpin Redaksi Tempo dalam Buku yang ditulis Keller (2009), mengatakan bahwa Tempo memiliki mekanisme yang cukup untuk melindungi diri dari intervensi terhadap isi pemberitaan.

Selain Tempo, penulis juga memilih Kompas.com sebagai media pembanding. Kompas.com adalah portal media elektronik yang hanya memposting berita dan artikel dari Indonesia secara daring. Selain itu Kompas.com juga menjadi salah satu situs berita online terpopuler di Indonesia. Kenapa sebagai media pembanding? Karena penulis menemukan artikel dari Kompas.com yang berlawanan dengan Tempo. Penulis beranggapan kemungkinan Kompas.com memiliki kecenderungan mendukung pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan lebih banyak judul artikel berita yang cenderung memberikan perhatian lebih kepada Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu.

Kecenderungan Kompas terhadap Pemerintah sendiri lebih terlihat jelas pada media cetaknya. David Hill dalam Keller (2009) menyebutkan bahwa, Harian Kompas selama masa kepemimpinan Suharto patuh kepada pemerintah dan dianggap sebagai “*New Order newspaper par excellence*”. Selama periode rezim Suharto, Kompas mampu membuktikan diri sebagai media yang dapat menyesuaikan diri, dan dari kemampuan penyesuaian dirinya tersebut Kompas bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara ekonomi. Selain itu, sampai saat ini Kompas masih memiliki dan menjaga hubungan yang baik dengan para politisi. Acap kali artikel berita bisa direvisi mengacu pada aturan tak tertulis demi menghindari respon buruk dari para politisi dan mengganggu hubungan baik yang telah dibina (Keller, 2009:50). Singkatnya, Kompas lebih memilih main aman dan terhindar dari konflik yang merugikan daripada mencari kebenaran.

Salah satu contoh artikel pemberitaan yang memuat tentang Pilkada di tengah pandemi yang ditulis oleh Kompas.com, edisi 7 Juli 2020, dalam rubrik *News Nasional* yang berjudul “Pilkada di Tengah Pandemi, Apa Pentingnya Bagi Rakyat?”. Dalam pemberitaan tersebut, Pilkada di tengah pandemi dikatakan cukup rasional karena dilakukan demi kebaikan demokrasi nasional. Kompas.com kemudian juga membandingkannya dengan negara-negara yang telah berhasil melaksanakan pemilihan umum di tengah krisis pandemi. Kompas.com menilai

penundaan Pilkada akibat pandemi virus *COVID-19* itu bisa merusak demokrasi. Selain itu, ketidakstabilan politik selama pandemi terancam sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap pemerintah. Hal itu karena pandemi dapat dijadikan alasan bagi pemerintah otoriter untuk membentengi kekuasaan dengan mencabut hak politik untuk memilih dan dipilih.

Dari peristiwa-peristiwa di atas, maka penulis ingin mengangkat fenomena ini sebagai suatu permasalahan yang akan diteliti, dengan berfokus pada pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi virus *COVID-19*, Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pembaca penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemberitaan portal media online terhadap polemik penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus *COVID-19* dengan pemberitaan pada periode Juni hingga Desember 2020. Pada periode tersebut fase-fase tahapan Pilkada termasuk dalam fase pendaftaran pasangan calon, kampanye pasangan calon, sampai fase pelaksanaan pemilihan. Periode tersebut juga bertepatan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang bertolak belakang dengan penyelenggaraan Pilkada sehingga menimbulkan Polemik. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi acuan dalam menentukan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana polemik penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi *COVID-19* dibingkai oleh portal berita online Tempo.co dan Kompas.com?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang dari dua portal media online terkait isu penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi virus *COVID-19*, dan bagaimana masing-masing portal media online membingkai pemberitaan polemik Pilkada di tengah pandemi pada masa kampanye berlangsung. Periode pemberitaan dari Juni hingga Desember 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara akademis yaitu dapat menambah wawasan keilmuan tentang bingkai berita media online dengan menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam suatu pemberitaan di portal media online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para akademisi ilmu komunikasi, khususnya yang jurusan jurnalisme dan penyiaran dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian ini. Penulis memilih beberapa penelitian sebelumnya dengan melihat topik, teori, dan metode yang relatif serupa untuk membandingkannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Esti Sri Handayani dan Ahmad Junaidi pada tahun 2019 berupa jurnal ilmiah berjudul “Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden 2019 di Media Siber dan Penerapan Elemen Jurnalisme (Analisis Framing Pada *Okezone.com* dan *Suara.com*)”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk melihat bagaimana kedua portal media online menginterpretasikan sebuah realita untuk membingkai peristiwa menjadi berita, juga untuk mengetahui bagaimana elemen jurnalisme diaplikasikan ke dalam pembingkai berita. Penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian analisis framing dibantu dengan instrumen model milik *Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki*. Pengumpulan data berupa observasi non-partisipan pada kedua portal media *online*, studi kepustakaan, pencarian data *online* serta dilengkapi dengan wawancara informan. Hasil penelitian menyatakan penggunaan bahasa dan pemilihan kata memainkan peran penting dalam mengkonstruksi realitas media massa, dalam hal ini portal media online. Pada akhirnya hal itu dapat

mengungkapkan sikap media online dalam pemberitaan Pilpres 2019. Dilihat dari hasil temuannya, media massa pada dasarnya telah menawarkan dua perspektif yang berbeda pada pemberitaannya. Judul dan isi berita yang disajikan, beberapa lebih banyak menonjolkan satu perspektif tertentu dibanding lainnya. Penerapan kaidah elemen jurnalisme cukup baik, Namun pada beberapa poin sering terindikasi adanya pengabaian dalam pemberitaan tentang kampanye Pilpres 2019. (Handayani & Junaidi, 2018). Penelitian tersebut diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Letak persamaannya dapat dilihat dalam membahas pemberitaan media daring dalam menyajikan berbagai informasi dan berita terkait Pemilu, selain itu persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah model analisis framing yang digunakan, yaitu model *Pan & Kosicki*. Walaupun sejalan, penelitian yang akan membahas Pilkada di tengah pandemi ini adalah penelitian baru tentang pemberitaan portal media daring dalam membongkai berita terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi virus *COVID-19*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Qolbi (2018), mengungkap bagaimana keberpihakan media cetak lokal di Banyumas dalam pemberitaan Pilkada di wilayah tersebut. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing model *Robert N. Entman* yang terdiri dari beberapa kerangka analisis, yakni; *problem identification, causal interpretation, make moral judgement, dan treatment recommendation*. Berita yang dianalisis adalah berita menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 1 Desember 2017 hingga 31 Januari 2018. Berdasarkan kerangka analisisnya, Zuhul Qolbi mendapati bahwa Radar Banyumas dan Satelit Post cenderung berpihak pada pasangan calon kepala daerah tertentu. Qolbi berpendapat bahwa media semestinya tetap netral dalam menyebarkan informasi kepada publik. Faktanya, media tidak bisa terhindar dari berbagai faktor yang mempengaruhi isi berita, antara lain yaitu; faktor personal, faktor kebiasaan media, faktor lembaga, faktor ekstramedia, dan faktor pandangan. Dalam kasus ini, pemberitaan tentang Pilkada juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Letak persamaannya dapat dilihat dalam membandingkan dua media massa dalam membongkai berita terkait Pilkada

dan juga pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan analisis framing. Walaupun sejalan, ada perbedaan mendasar dari model analisis framing yang digunakan, penelitian dari Zuhail Qolbi menggunakan model analisis framing dari Robert Entman, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini menggunakan model dari Pan & Kosicki. Perbedaan lain yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti saat ini terletak pada objek penelitian dan beberapa kajian teorinya.

Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Pardianto (2014), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Harian Rakyat Maluku dan *Ambon Express* membingkai pemberitaan pasangan calon kepala daerah di Maluku. Penelitian tersebut menggunakan metode Analisis Teks melalui Analisis Framing dengan menggunakan instrumen model *Zhondang Pan & Gerald M. Kosicki*. Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa *Ambon Express* dan Harian Rakyat Maluku cenderung fokus pada salah satu pasangan calon gubernur dan wakilnya yang akan bersaing di Pilkada Maluku, meski begitu kedua media massa tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap pasangan calon gubernur dan wakilnya yang difokuskan. Artinya, objektivitas serta independensi dari kedua media tersebut dalam memberitakan sebuah peristiwa masih dipertanyakan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal metode dan model Analisis Framing yang digunakan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Nurhajati, dan Wijayanto (2018), Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk memahami bagaimana sebenarnya media online di Indonesia melakukan pembingkai berita dalam isu politik uang, khususnya dalam pagelaran Pilkada tahun 2018. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing dengan model instrumen *Robert N. Entman* untuk menganalisa pembingkai berita di 5 portal media online di Indonesia, antara lain yaitu Kompas.com, Tribunnews.com, Sindonews.com, Liputan6.com, dan Detik.com,. Hasil penelitian ini mendapati bahwa secara umum, cara pembingkai berita di media tidak banyak berbeda. Hanya saja pada bagian saran perbaikan, tampaknya belum secara jelas menunjukkan kepatuhan etis terhadap etika dan regulasi yang secara eksplisit melarang penerapan politik uang dalam Pilkada. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang akan penulis lakukan

yaitu menganalisis media online dalam membingkai berita terkait isu tertentu, dalam hal ini isu yang diangkat oleh penulis adalah Polemik Pilkada Ditengah Pandemi, yang membedakan hanya model Analisis Framing yang digunakan.

Penelitian yang kelima yaitu ditulis oleh Malik, Sultan, dan Kahar (2017). Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis bingkai berita Pilkada

Kabupaten Takalar yang dipublikasi Tribunnews.com. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivistik, dimana data diinterpretasi sesuai teori framing. Metode penelitian ini adalah Analisis Framing model *Pan & Kosicki*. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa Tribunnews.com, membahas dua topik menonjol tentang Pilkada Kabupaten Takalar diantaranya pendapat partisan dan kampanye Pilkada Kabupaten Takalar. Framing pendapat partisan adalah kategori berita yang sangat dominan, tetapi Tribunnews.com secara seimbang mengemukakan pendapat partisan dari masing-masing kubu. Proses pemilihan isu adalah hal yang diutamakan oleh pimpinan redaksi pada saat rapat redaksi dan wartawan dapat mengusulkan topik pemberitaan yang sesuai dengan realitas di lapangan. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dan metode dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang membedakannya yaitu fokus utama pada objek penelitian dan juga sumber pengumpulan data.

Penelitian yang keenam yaitu ditulis oleh Prasetya, Hadi, dan Wijayanti (2020). Tujuan penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bingkai berita yang dilakukan media dalam pemberitaan yang disajikan oleh portal media online Tempo.co dan Detik.com dengan topik “Sandiwara Uno”. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa baik Tempo.co maupun Detik.com mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan topik “Sandiwara Uno”. Untuk metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah analisis framing dengan model *Zhongdang Pan* dan *Gerald M. Kosicki*. Pada penelitian tersebut yang menjadi bingkai utama dalam topik “Sandiwara Uno” adalah pemilihan narasumber sebagai kutipan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan sudut pandang pada dua media online yang diteliti, pada Detik.com membingkai berita dengan menyebut kampanye yang dilakukan Sandiaga Uno adalah Kampanye Sandiwara, sedangkan Tempo.co melihat dengan sudut pandang berbeda dengan menyebut Sandiaga Uno tidak melakukan sandiwara atau rekayasa dalam berkampanye. Penelitian tersebut

memiliki kesamaan metode dan model analisis framing dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, objek penelitian pada penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan salah satu objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu Tempo.co. Perbedaan hanya terletak pada topik utama penelitian dan juga media pembanding.

Penelitian ketujuh berupa jurnal komunikasi yang ditulis oleh Sofian dan Lestarini (2021). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tempo.co membingkai berita dalam pemberitaan terkait kebijakan Pemerintah dalam menangani kasus *COVID-19* di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah analisis framing dengan memakai model dari Robert N Entman. Hasil temuan penelitian ini menyebutkan bahwa Tempo.co membingkai sikap Pemerintah yang tidak ada kesiapan dalam hal kebijakan yang dibuat sehingga Pemerintah terkesan tidak berhasil dalam menangani kasus *COVID-19*. Penelitian tersebut mempunyai kemiripan topik dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penanganan kasus *COVID-19* oleh Pemerintah. Bedanya, penulis juga menambahkan topik lainnya yang tumpang tindih dengan kebijakan Pemerintah sehingga menimbulkan polemik di mata publik. Kesamaan lain terletak pada media yang digunakan yaitu Tempo.co. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada pemilihan jumlah media yang diteliti dan pemilihan model analisis framing yang akan digunakan.

Penelitian yang kedelapan yaitu dari Arum Hapsari (2021), tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan struktur makro, superstruktur dan mikro dalam wacana pro kontra Pilkada 2020 yang diselenggarakan pada masa pandemi virus *COVID-19* pada pemberitaan Kompas.com edisi september 2021. Penelitian ini menggunakan metode linguistik deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan teori Teun Van Dijk. Hasilnya, penelitian tersebut mampu menunjukkan bahwa semua struktur dalam teori Teun Van Dijk ditemukan dalam wacana ini. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan tersebut dapat dilihat pada pemilihan Tema yaitu “Pilkada di tengah Pandemi”, dan juga menggunakan pemberitaan dari media online Kompas.com sebagai objek penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya hanya terletak pada metode dan juga teori teknik analisis data yang digunakan.

Penelitian kesembilan merupakan Jurnal Komunikasi yang ditulis oleh Hayati dan Yoedtadi (2020). Penelitian tersebut membahas analisis framing berita COVID-19 pada edisi Maret 2020 dalam dua portal media online, yaitu Kompas.com dan juga Tribunnews.com, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaiannya yang dilakukan oleh kedua portal media online tersebut dalam memberitakan kasus COVID-19. Penelitian tersebut menggunakan model analisis framing dari Robert N Entman yang kemudian menemukan bahwa Tribunnews.com seringkali mengungkapkan fakta yang tidak akurat serta tidak berempati kepada pasien COVID-19. Sedangkan Kompas.com cenderung melihat persoalan dari sudut pandang Pemerintah yang mana hanya memberikan himbauan kepada masyarakat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, persamaan itu terletak pada media yang diteliti dan juga tema penelitian. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan model analisis framing Robert N Entman. Selain itu, media lainnya yang berperan sebagai pembanding juga berbeda dengan media yang penulis teliti.

Penelitian kesepuluh yaitu ditulis oleh Boer, Pratiwi dan Muna (2020). Penelitian tersebut merupakan Jurnal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemberitaan mengenai Gugus Tugas penanganan COVID-19 pada tiga media online dengan edisi Maret 2020. Penelitian tersebut memakai Robert N Entman sebagai model analisis framing yang digunakan. Hasilnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga media online tersebut mampu memberikan ruang klarifikasi bagi Pemerintah dalam hal ini yaitu Gugus Tugas COVID-19 dalam menanggapi pro-kontra yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan keterlibatan para *Influencer*. Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah kesamaan dalam pemilihan media yang digunakan, dan juga tema penelitian yaitu seputar COVID-19 dan Pemerintah. Perbedaan jelas terletak pada penggunaan model analisis framing dan juga jumlah media online yang diteliti.

Dilihat dari kesepuluh penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan banyak kesamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan yang paling sering ditemukan adalah pemilihan media online yang akan diteliti. Tempo.co dan

Kompas.com menjadi portal media online yang paling banyak diteliti berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas. Tentunya hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa Tempo.co dan Kompas.com merupakan media yang layak diteliti dan mempunyai nilai lebih dibandingkan media online lainnya. Untuk perbedaannya, setiap penelitian pastinya memiliki perbedaan terutama dalam memilih topik, meskipun tetap dalam ruang lingkup tema yang serupa. Dalam hal ini, penulis menggabungkan dua tema berbeda yaitu tema politik dan tema kesehatan menjadi satu topik penelitian baru. Selain itu, karena peristiwa yang luar biasa yaitu Pilkada di tengah pandemi *COVID-19* dan belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan topik penelitian yang penulis teliti memiliki suatu keunggulan karena peristiwa yang terjadi tergolong baru dan masih hangat diperbincangkan.

2. Kajian Teori

a. Fungsi Media di Tengah Demokrasi dan Kebebasan Informasi

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi menjadi perbincangan hangat di beberapa media, khususnya media online. Isu tersebut menjadi polemik dan memecah arus media massa menjadi dua kubu, yang mendukung penyelenggaraan Pilkada dan yang menentang penyelenggaraan Pilkada.

Pilkada adalah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih calon terbaik yang pantas untuk memimpin daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang terdaftar dan memenuhi syarat. (Sumber: Simkada, <https://bit.ly/3nM2zq5>). Menurut Marijan pada tahun 2010, Semestinya penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan hendaklah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilakukan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama pemilu demokratis adalah partisipasi politik. (seperti dikutip dalam Sutrisno, 2017, hal. 36).

Dominick & Joseph R, dalam Bahanan (2020) mengatakan bahwa media pada dasarnya memiliki fungsi yang termasuk: Pengawasan (menyampaikan informasi), interpretasi, menghubungkan berbagai elemen masyarakat, berbagi nilai, dan hiburan. Media massa dapat memengaruhi apa yang dipikirkan

khalayak. Dengan kata lain, pengaruh media massa dapat berimbas pada persepsi publik terhadap apa yang mereka anggap penting. (Musfialdy, 2015:69-76). Lebih lanjut Musfialdy mengatakan, Media harus memprioritaskan informasi sebagai alat yang independen atau netral dalam Pemilu. Media sebagai pilar keempat juga diharapkan mampu menyuarakan dinamika sosial politik di suatu daerah kepada masyarakat.

Media online adalah generasi setelah media massa. Salah satu produk media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik adalah portal berita atau situs berita online. Umumnya yang termasuk media online seperti teks, foto, video dan audio dalam bentuk apapun atau format yang hanya dapat diakses melalui Internet. Dalam pemahaman ini, media online juga dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi online. Email, website, media sosial, dan blog dapat dimasukkan ke dalam kategori media online menurut definisinya. (Romli M, 2012:34).

b. Media Framing dan Kecenderungan Pemberitaan

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Framing artinya membingkai. Maka, media framing adalah kegiatan pembingkaiian yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaiian yang dimaksud yaitu membingkai artikel atau berita sehingga dapat mengkonstruksi suatu realitas yang diinginkan oleh si penulis berita. Pembingkaiian berita sendiri dapat di lihat dari sudut pandang wartawan dalam menuliskan fakta. Dari sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bagaimana kecenderungan wartawan dalam menuliskan pemberitaan.

Jurnalisme online merupakan suatu teknik atau kegiatan yang mengulang informasi dari pelaporan hingga penggarapan yang memadai untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas. Teknologi itu sendiri meliputi kegiatan mencari, menyatukan, memilih dan mengolah informasi, termasuk nilai berita, dan membuatnya tersedia secara luas melalui media elektronik (Malik dkk, 2017). Jurnalisme online merupakan jenis jurnalisme baru karena memiliki banyak karakteristik yang berbeda dengan koran tradisional atau jurnalisme

konvensional. Penulisan berita online hampir sama dengan berita cetak, yang membedakan adalah pemuatannya, dimana berita online medianya adalah internet.

Juditha (2013) berpendapat, Sejalan dengan lajunya perkembangan media online yang tak terkendali, jurnalisme online selalu menjadi perhatian karena kerap dianggap tidak mengutamakan objektivitas (akurasi, *fairliness*, kelengkapan dan imparzialità) berita hanya untuk mengejar kecepatan (hal. 145-154). Meskipun pada dasarnya media massa tidak pernah lepas dari kecenderungan terhadap satu pihak namun kecenderungan terhadap pihak tertentu dalam menulis pemberitaan lebih sering ditemukan pada media online karena sifatnya yang cepat.

c. Metode Analisis Framing

Analisis framing sederhananya dapat dideskripsikan sebagai analisis untuk memahami bagaimana realitas dibingkai media (peristiwa, pelaku, kelompok, dll). Pembingkaiian yang dilakukan media tersebut melewati proses konstruksi. Dalam analisis framing, realitas didefinisikan dan dibentuk dengan makna tertentu. (Anggoro, 2014). Ada bermacam-macam model perangkat analisis framing yang dapat dipakai untuk menganalisa teks media, salah satunya yaitu model *Pan & Kosicki*. Model analisis framing ini memiliki keunggulan sebagai salah satu model analisis framing yang paling populer dan banyak digunakan. Pada prosesnya Framing diartikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih mencolok, meletakkan informasi lebih menonjol daripada yang lain sehingga khalayak akan terarahkan pada pesan tersebut. (Eriyanto, 2002:296) Selain itu konsep analisis framing model *Zhongdang Pan* dan *Gerald M. Kosicki* lebih mengutamakan kepada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya.

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma atau pendekatan konstruksionis. Paradigma konstruksionis menganggap bahwa tidak ada realitas yang adil, karena realitas tercipta dengan menjalani proses konstruksi dan pemikiran tertentu (Anggoro, 2014). Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berbasis filosofi postpositivis yang mempelajari keadaan topik yang alamiah dengan penulis sebagai instrumen kunci. Tujuan dan metode pengumpulan data saat ini adalah triangulasi dan analisis data. Ini bersifat induktif/kualitatif, lalu hasil penelitian kualitatif akan menekankan definisi daripada generalisasi (Sugiyono, 2010:15).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merujuk kepada berita-berita di portal media online *Tempo.co* dan *Kompas.com*. Judul berita yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut berjumlah masing-masing 10 judul berita yang memiliki kecenderungan tertentu terhadap isu yang dibahas, dalam hal ini terkait isu Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Periode teks yang penulis kumpulkan yaitu dari periode Bulan Juni - Desember 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan adalah teks-teks pemberitaan terkait Pilkada ditengah pandemi. Diambil dari dua portal berita online yakni *Tempo.co* dan *Kompas.com*. Dimulai dari menelusuri pada masing-masing portal, lalu mencari berita di kolom pencarian yang disediakan. Lalu, penulis menuliskan kata kunci untuk mendapatkan artikel berita yang relevan, kata kunci tersebut yaitu “Pilkada dan Pandemi”. Setelah hasil penelusuran keluar, penulis menyaring berita yang paling relevan dan berkaitan. Penulis menelusuri setiap nomer kolom yang tersedia, untuk *Tempo.co* dan *Kompas.com* sama-sama menyediakan 10 nomer kolom dengan masing-masing nomer terdapat 10 judul berita.

Penulis kemudian memilih dan mencatat masing-masing media 10 judul berita untuk kemudian diolah dan dianalisis. Kriteria pemilihan berita yaitu yang pertama dengan memperhatikan Tema/Judul berita yang relevan dengan topik

penelitian, dalam hal ini berita tentang “Pilkada di tengah Pandemi”. Yang kedua yaitu dengan mengelompokkan berita tersebut ke dalam 3 fase, yaitu fase Pro-Kontra Penyelenggaraan Pilkada, fase Tahapan Pilkada (Pendaftaran, Kampanye, Pemilihan), dan fase Pasca Pilkada. Pengelompokkan tidak ditentukan dengan jumlah berita namun ditentukan berdasarkan isi berita.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis framing. Analisis framing dianggap mampu untuk melihat bagaimana *Tempo.co* dan *Kompas.com* mengerjakan proses pembedaan berita Pilkada di masa pandemi virus *COVID-19*. Penulis memakai model analisis framing dari Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Penulis memilih menggunakan perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena perangkat ini menyediakan pendekatan yang mendetail dengan dibagi menjadi empat struktur dan masing-masing struktur memiliki unitnya sendiri untuk diamati. Struktur-struktur dari model ini mampu menggambarkan bagaimana wartawan dalam memaknai dan mengkonstruksi peristiwa. Model ini memiliki empat struktur, yang mana empat struktur tersebut merupakan rangkaian yang dapat memperlihatkan framing dari suatu media. Kecenderungan wartawan dalam memaknai suatu peristiwa dapat diamati menggunakan struktur-struktur ini (Eriyanto, 2002:294). Keempat struktur perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu:

Tabel 1.1**Perangkat Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki**

No.	Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
1.	Sintaksis (Cara Wartawan Menyusun Fakta)	1. Skema Berita	a. Headline b. Lead c. Latar Informasi d. Kutipan e. Sumber f. Pernyataan g. Penutup
2.	Skrip (Cara Wartawan Mengisahkan Fakta)	2. Kelengkapan Berita	5W+1H
3.	Tematik (Cara Wartawan Menuliskan Fakta)	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	a. Paragraf b. Proposisi c. Kalimat d. Hubungan antar kalimat
4.	Retoris (Cara Wartawan Menekankan Fakta)	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	a. Kata Idiom b. Gambar Foto c. Grafik

(Eriyanto, 2002: 295)

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Profil Media Online Tempo.co

1. Sejarah Singkat

Tempo.co bermula dari majalah tempo, yang berdiri pada tahun 1971. Majalah tempo diinisiasi oleh enam orang wartawan, yaitu Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono, mereka melakukan perundingan dengan Ciputra selaku pendiri/ketua Yayasan Jaya Raya dan juga Eric Samola yang kala itu menjabat sebagai sekretaris. Hasil dari perundingan tersebut menyepakati terbentuknya majalah Tempo yang dibiayai oleh Yayasan Jaya Raya.

Ada tiga alasan yang mendasari mengapa “Tempo” akhirnya terpilih menjadi nama resmi majalah. Alasan pertama karena “tempo” terdengar pendek dan sederhana, juga sangat mudah diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kedua, nama “Tempo” terkesan netral dan tidak heboh. Dan alasan yang terakhir karena “Tempo” bukan representasi dari suatu golongan. Dari tiga alasan tersebut, kesimpulannya arti “Tempo” sederhana saja, yaitu waktu yang biasa dipergunakan oleh banyak publikasi jurnalistik di seluruh dunia dengan segala perbedaannya. (Sumber: Tempo.id, <https://bit.ly/3uk8Rjv>)

Sebelum resmi berdiri, Tempo menerbitkan majalah edisi pengantar pada Februari 1971 dengan sampul bertajuk “Tragedi Minarni dan Kongres PBSI”. Lalu pada tanggal 6 Maret 1971, Tempo menerbitkan edisi pertama yang memuat sampul berjudul "Film Indonesia: Selamat Datang, Seks", yang resmi diluncurkan sebagai majalah. Selain itu, Jaya Press tercatat sebagai penerbit pertama dengan judul Yayasan Jaya Raya. PT Pikatan, sebuah perusahaan yang didirikan pada 4 Februari 1974 untuk memperbolehkan karyawan memiliki saham agar para pendiri Tempo bisa memiliki saham, bergabung bersama Jaya Raya mendirikan PT Grafiti Pers, membagi sama rata kepemilikan saham keduanya. *Masthead* sejak itu dinamai PT Grafiti Pers oleh penerbit majalah Tempo.

Tahun 1982, majalah Tempo dilarang terbit secara paksa untuk pertama kalinya. Karena pada saat itu Tempo dianggap terlalu intens ketika mengkritik rezim Orde Baru dan Partai Golkar. Pada 21 Juni 1994, melalui

Menteri Penerangan Harmoko, Tempo kembali dibredel untuk kedua kalinya. Majalah Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie serta Soeharto perihal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur. Lalu, pada saat pasca Orde Baru, para pekerja Tempo yang saat itu tercerai-berai akbiat pembredelan akhirnya kembali berkumpul dan merundingkan apakah majalah Tempo akan dibangkitkan lagi atau tidak. Hasilnya disepakati bahwa majalah Tempo dihadirkan kembali, dengan di bawah naungan PT Arsa Raya Perdana. Setelah itu, PT Arsa Raya Perdana menjual saham ke publik pada tahun 2001 dan berubah nama menjadi PT Tempo Inti Media, Tbk. Dan memiliki peran sebagai penanggung jawab baru dalam penerbitan majalah Tempo. (Sumber: Tempo.id, <https://bit.ly/3uk8Rjv>)

Tempo.co awal mulanya adalah Tempointeraktif.com. tempo interaktif hadir sebagai pionir awal pemberitaan media online sejak tahun 1995 untuk memberitakan kebutuhan sebagai media pemenuh kebutuhan informasi yang dapat dipercaya publik. Tempo interaktif kemudian mengalami beberapa kali pembaruan hingga yang terbaru pada 2011 tempo mengubah namanya dari Tempointeraktif.com menjadi Tempo.co. Tempo.co juga beberapa kali tercatat meraih penghargaan, antara lain, mendapatkan Silver Award “The Best Mobile Media 2011” dari Asia Digital Media Award 2011, selain itu Tempo.co juga menjadi juara dunia dalam kompetisi Hackathon Media, yang diselenggarakan oleh asosiasi Global Editors Network di Wina, Austria, 17 Juni 2016. Saat ini alamat kantor Tempo.co berada di Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan 12210.

2. Berita Tempo.co mengenai Pilkada di Tengah Pandemi

Pada periode Juni hingga Desember 2020, Tempo.co menerbitkan berita tentang Pilkada di tengah pandemi sebanyak kurang lebih 100 berita. Proses pemilihan berita dimulai dengan menelusuri portal Tempo.co. Setelah itu penulis melakukan pencarian berita menggunakan kolom pencarian yang tersedia. Kemudian, penulis menuliskan kata kunci yaitu “Pilkada dan Pandemi” di kolom pencarian sehingga mendapatkan berita yang relevan. Pada hasil pencarian terdapat 10 kolom berita dengan masing-masing kolom menyediakan 10 judul berita. Setelah melalui proses seleksi berita, penulis menyusutkan menjadi sebanyak 10 judul berita yang diteliti yang memiliki

keterkaitan dengan topik Pilkada di tengah pandemi *COVID-19*, yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Berita “Pilkada di Tengah Pandemi *COVID-19*” di Tempo.co periode Juni-Desember 2020

Judul Berita	Tanggal Berita Terbit
KPK Ingatkan Bahaya Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19	17 Juni 2020, 11:26 WIB
Komnas HAM Beberkan Alasan Pemerintah Harus Tunda Pilkada 2020	18 September 2020, 07:02 WIB
Minta Pilkada 2020 Ditunda, Kemitraan: Pemerintah dan KPU Menutup Mata	22 September 2020, 15:00 WIB
Mahfud MD Jelaskan 4 Alasan Pemerintah Ngotot Pilkada 2020 Jalan Terus	23 September 2020, 05:46 WIB
Pilkada 2020: Tambal Sulam Aturan Melarang Kerumunan	28 September 2020
LP3ES Sebut 5 Resiko Jika Pilkada 2020 Tetap Diadakan di Tengah Pandemi	1 Oktober 2020, 02:00 WIB
Minta Pilkada 2020 Ditunda, ICW: Demi Keselamatan Warga dan Tekan Kecurangan	2 Oktober 2020, 15:57 WIB
Bawaslu Sebut Masih Ada Pelanggaran Protokol Covid-19 Saat Kampanye	30 November 2020, 13:19 WIB
Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020 dari Aspek Pandemi, Ini Daftarnya	6 Desember 2020, 16:32 WIB
Perludem: Pilkada 2020 Lancar karena Diawasi Ketat Masyarakat Sipil	12 Desember 2020, 13:09 WIB

B. Profil Kompas.com

1. Sejarah Singkat

Kompas.com berasal dari Harian Kompas yang didirikan pada tahun 1965 oleh Frans Seda, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Katolik, bersama dengan dua rekannya yang sudah berpengalaman di bidang media yaitu Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama. Jakob Oetama sebelumnya adalah redaktur mingguan “Penabur” dan PK Ojong adalah Pemimpin redaksi mingguan “*Star Weekly*”. Mereka bertiga mendirikan media cetak atas usulan dari Jendral Achmad Yani yang kala itu ingin menghadang dominasi pemberitaan pers komunis. Untuk mewujudkan ide tersebut, Frans Seda dan kawan-kawan terlebih dahulu mendirikan koran Bentara Rakjat, namun sebelum terbit, Presiden Soekarno memberikan anjuran agar menggunakan nama Kompas.

Pada edisi perdananya, Kompas terbit sebanyak empat halaman dengan 20 berita di halaman I, dan terbit sebanyak 4.828 eksemplar. Krisis kertas memaksa Kompas berulang kali terbit dengan jumlah ukuran, kolom dan halaman yang bervariasi periode 1966 hingga 1968. Awalnya, Kompas diterbitkan sebagai surat kabar mingguan yang terbit empat kali seminggu. Sejak 1969, Kompas telah diakui sebagai koran nasional oleh beberapa kalangan. Namun, pada Januari 1978, Kompas bersama tujuh media lainnya dilarang terbit secara paksa, tujuh media tersebut diantaranya The Indonesia Times, Sinar Pagi, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, dan Pos Sore. Namun tidak berlangsung lama karena dua minggu kemudian Kompas terbit kembali setelah pembredelan. Kompas minggu memiliki ciri khas tersendiri pada rubriknya, seperti “Gambar dalam Sepekan” dan “Fokus Peristiwa Pekan Ini”. (Sumber: Kompas.id, <https://bit.ly/3ukn8N1>)

Perjalanan bisnis Kompas sampai pada titik di mana saat itu mereka kewalahan mengedarkan koran ke penjuru Indonesia karena terkendala geografis. Selain itu pembaca yang berada di luar negeri juga sering terlambat ketika menerima informasi dari Harian Kompas. Maka Kompas membuat versi online dari edisi cetaknya dengan sebutan Kompas Online pada saat itu. Pada 14 September 1995 Kompas Online awalnya berdomain Kompas.co.id kemudian berlalih ke domain dotcom pada awal tahun 1996. Lalu, dua tahun kemudian Kompas Online berkembang menjadi unit bisnis

mandiri dibawah naungan PT Kompas Cyber Media. Dengan adanya website Kompas.com maka bisa memudahkan siapa saja untuk mengakses dan memperoleh informasi dari Kompas secara cepat dan aktual.

Dalam satu dekade terakhir, sejauh ini Kompas.com telah berhasil mengantongi puluhan penghargaan. Beberapa diantaranya meraih *Back-to-back* “Best in Social Media” dari *WAN IFRA Silver Award* pada 2010 dan 2011. Memperoleh Anugerah Adinegoro dalam rangka Hari Pers Nasional pada tahun 2015. Memperoleh dua kali “Great Performing Website dalam kategori News Portal” dari *Digital Marketing Award* pada tahun 2014 dan 2016. Mendapatkan “Gold Champion dalam kategori News Website” dari *WOW Brand Award* pada tahun 2017. Lalu mendapatkan Sertifikasi dari *International Fact-Checking Network (IFCN)* pada tahun 2018. Dan yang terbaru adalah mendapatkan penghargaan sebagai “Trusted Online Media” dari *Superbrands Award* pada tahun 2019. Dengan prestasi yang metereng maka tidak heran jika Kompas.com menjadi portal media online yang difavoritkan oleh masyarakat dan menjadi situs berita terpopuler di Indonesia. (Sumber: Inside Kompas, <https://bit.ly/3ugQOuu>). Saat ini kantor Kompas.com berada di PT. Kompas Cyber Media, Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5, Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28, Jakarta 10270, Indonesia.

2. Berita Kompas.com mengenai Pilkada di Tengah Pandemi

Pada periode Juni hingga Desember 2020, Kompas.com menerbitkan berita yang berisikan tentang Pilkada di tengah pandemi tersebut sekitar kurang lebih 100 berita. Proses pemilihan berita dimulai dengan menelusuri portal Kompas.com. Setelah itu penulis melakukan pencarian berita menggunakan kolom pencarian yang tersedia. Kemudian, penulis menuliskan kata kunci yaitu “Pilkada dan Pandemi” di kolom pencarian sehingga mendapatkan berita yang relevan. Pada hasil pencarian terdapat 10 kolom berita dengan masing-masing kolom menyediakan 10 judul berita. Setelah melalui proses seleksi berita, penulis menyusutkan menjadi sebanyak 10 judul berita yang diteliti yang memiliki keterkaitan dengan topik Pilkada di tengah pandemi *COVID-19*, yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Berita “Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19” di Kompas.com
periode Juni-Desember 2020

Judul Berita	Tanggal Berita Terbit
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung.	16 Juni 2020, 17:18 WIB
Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi.	21 Juni 2020, 22:12 WIB
Pilkada di Tengah Pandemi, Apa Pentingnya bagi Rakyat?	7 Juli 2020, 14:14 WIB
Pilkada Berlanjut, Ketua KPU: Tak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Berakhir.	29 Juli 2020, 18:15 WIB
DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi	22 September 2020, 12:57 WIB
Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19	24 September 2020, 07:29 WIB
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19	30 September 2020, 16:26 WIB
Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19	9 November 2020, 13:31 WIB
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi	5 Desember 2020, 06:02 WIB
Pilkada 2020: Digelar di Tengah Pandemi, Ditentang hingga Sederet Aturan Baru	9 Desember 2020, 09:02 WIB

C. Pilkada di tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda demokrasi rutin di Indonesia yang biasanya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pilkada juga merupakan versi lain dari Pemilihan Umum biasa. Yang membedakannya adalah Pilkada memiliki tingkat yang lebih kecil yaitu untuk daerah/provinsi. Sebelum tahun 2005, wakil kepala daerah dan kepala daerah diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Sumber: Simkada, <https://bit.ly/37tT0Fc>) . Kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dipilih secara langsung oleh masyarakat setelah terbitnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU No.32 Tahun 2004. Kepala daerah yang dipilih meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan juga Bupati dan Wakil Bupati. (Sumber: Simkada, <https://bit.ly/37tT0Fc>)

Budiarjo pada 2008 pernah menjelaskan tentang pengertian Pilkada dalam jurnal Sutrisno (2017), Pilkada langsung sebenarnya adalah jalan demokrasi dan moral konstitusi Indonesia yang mesti diselenggarakan dengan cara demokratis. Pilkada yang demokratis bisa menjadi lambang dan juga menjadi salah satu tolak ukur demokrasi modern yang ada di Indonesia jika hasilnya mencerminkan keterlibatan dan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan juga berserikat (hal. 38). Namun, Pilkada tahun 2020 lalu sempat menuai polemik di kalangan masyarakat dan media. Hal tersebut disebabkan masih berlangsungnya pandemi virus Covid-19 di Indonesia, sehingga pemerintah dianggap tidak bijak dalam mengambil keputusan dengan tetap menyelenggarakan Pilkada ditengah-tengah krisis pandemi karena dikhawatirkan dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia.

Pandangan dunia saat ini memang sedang terpusat pada penanganan virus Covid-19 yang tak kunjung reda. Saking derasnya virus ini berkembang dan menyebar hingga menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Persebaran kasus Covid-19 di Indonesia sendiri selama 2020 lalu dinilai berkembang sangat signifikan, terlebih respon pencegahan dari pemerintah yang terkesan lambat dan kacau membuat persebaran virus Covid-19 tidak terelakkan lagi. Data dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pertumbuhan kumulatif pasien positif Covid-19 per 31 Januari 2021 di Indonesia telah mencapai 1,2 juta kasus. Dengan angka setinggi itu maka wajar jika masyarakat khawatir dengan penyelenggaraan Pilkada yang beresiko tinggi terhadap penularan dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat Indonesia.

Pemerintah tentunya sudah berusaha maksimal dalam menerapkan kebijakannya. Buktinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini dinilai cukup baik untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 baru di Indonesia. Di Indonesia pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar pada kehidupan sosial dan berpolitik. Contoh nyatanya adalah dimulainya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan ini berdampak langsung terhadap kehidupan bersosial masyarakat Indonesia. PSBB sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut tentu saja masyarakat diminta untuk menghindari keramaian, tempat umum, dan melarang acara yang mengundang kerumunan. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya Pilkada, karena kebijakan tersebut bertolak belakang dengan prinsip Pilkada. Pilkada mengundang partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat memicu kerumunan, dan kerumunan menciptakan klaster Covid-19 yang baru.

Peran media sebagai pilar keempat, bersama dengan lembaga legislatif, administratif, dan yudikatif, harus mewakili dinamika sosial politik masyarakat Indonesia. Dari sini, media semestinya mengutamakan informasi sebagai alat yang independen atau netral dalam berlangsungnya proses pemilihan. Kajian yang dilakukan oleh *Bill Kovak* dalam buku “Sembilan Elemen Jurnalisme” pada tahun 2003, mengemukakan bahwa jurnalisme dan demokrasi hidup berdampingan. Demokrasi tanpa jurnalisme politik yang baik tentu tidak akan ada. Dalam kasus Pilkada, media perlu menyediakan fakta dan informasi independen terkait peristiwa dan isu yang akan menjadi tolak ukur publik dalam pengambilan keputusan. (dikutip dalam Musfialdy, 2015, hal.73)

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang analisis yang dilakukan terhadap berita-berita yang dimuat oleh dua portal media online yaitu Tempo.co dan Kompas.com. Penelitian ini menggunakan 20 sampel berita yang diambil dari kedua portal media online dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu bulan Juni hingga Desember 2020. Adapun penyajian diurutkan dengan urutan waktu atau kronologi diiterbitkannya berita yang bersangkutan di masing-masing portal media online.

Dengan menggunakan analisis framing model *Pan* dan *Kosicki*, penelitian ini berusaha menelaah bagaimana berita polemik penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan pada masa pandemi virus *COVID-19*.

A. Analisis Framing Pan dan Kosicki terhadap Pemberitaan Tempo.co

Tabel 3.1

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1 Pemberitaan *Tempo.co*

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i> /Judul	KPK Ingatkan Bahaya Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
	<i>Lead</i>	KPK Mengingatkan ada sejumlah resiko yang muncul bila Pilkada 2020 dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
	Latar Informasi	Belum adanya regulasi membuat Pilkada di tengah Pandemi beresiko.
	Kutipan Sumber	Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK, Wijanarko <ul style="list-style-type: none"> • Dengan persentase partisipasi yang rendah itu, kalau ada 4 kandidat saja maka kira-kira para pengusaha yang korup itu bisa mengkooptasi Pilkada. • Politik transaksional itu mudah menyamar sebagai bantuan sosial Covid-19, di sejumlah daerah sudah

		<p>muncul bansos yang berbalut kampanye.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ini akan menjadi bencana nasional baru • KPK tidak bisa menyatakan Pilkada harus ditunda, tapi dengan resiko yang luas itu perlu dipertimbangkan baik buruknya.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis di dalam berita.
	Penutup	Kutipan pernyataan dari Wijanarko yang mengatakan KPK tidak menyatakan Pilkada harus ditunda, namun perlu pertimbangan lebih lanjut terkait baik buruknya dengan resiko yang seluas itu.
Skrip	What	Pernyataan dari Wijanarko tentang resiko yang timbul jika Pilkada dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
	Where	Jakarta
	When	17 Juni 2020
	Who	Wijanarko
	Why	Pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan membuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan rendah, akibatnya dapat membuat politik uang semakin marak dan hasil pemilu kehilangan legitimasinya.
	How	Tidak ada.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf disusun dengan pernyataan dari KPK yang mengingatkan sejumlah resiko yang muncul bila Pilkada 2020 dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Kemudian diikuti alasan peringatan tersebut karena tidak siapnya regulasi. Lalu dihubungkan dengan penjabaran poin-poin dari sejumlah resiko yang disebut sebelumnya.

Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Politik Uang, Legitimasi, Kooptasi, Bansos Berbalut Kampanye, Klaster, Acara Olahraga Sejangat. • Gambar ilustrasi yang digunakan adalah foto jari kelingking yang dicelupkan kedalam tinta berwarna ungu.
---------	----------------------------------	---

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “KPK Ingatkan Bahaya Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”. Judul pada pemberitaan ini memberi pesan kepada masyarakat bahwa Pilkada di tengah pandemi memiliki resiko besar jika tetap diselenggarakan. Artikel berita hanya diperkuat dengan pendapat dari satu narasumber yaitu Direktur PJKAKI KPK, Wijanarko yang dalam artikel tersebut menyebutkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dapat menimbulkan sejumlah resiko. Tempo kemudian menuliskan secara rinci resiko-resiko yang dimaksud oleh narasumber. Resiko tersebut antara lain yaitu sebagai kesempatan bagi pengusaha yang nakal dan korup untuk memanipulasi suara, selain itu juga dapat menjadi ladang politik uang yang berkedok bantuan sosial untuk warga yang terdampak virus Covid-19, dan yang terparah adalah kemungkinan timbul klaster baru karena Pilkada adalah *event* yang mengundang kerumunan. Menurut Wijanarko resiko-resiko tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang jelas untuk menangani situasi Pilkada di tengah pandemi, baik dari sisi politik maupun sisi kesehatan.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini menjelaskan secara detail bagaimana Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Bahaya dan resiko jika Pilkada diselenggarakan di tengah pandemi virus Covid-19. Kemudian (*Why*) unsur ini menjadi jawaban mengapa Wijanarko memberi himbuan dan peringatan tentang bahaya Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi. Unsur ini menjelaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara Pilkada belum siap dalam hal regulasi yang dapat mengatur bagaimana semestinya Pilkada diselenggarakan saat pandemi. Selain itu, unsur yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*), tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, struktur tematik pada artikel ini menjelaskan secara detail bagaimana Tempo.co menuliskan informasi, dapat dilihat bahwa Direktur PJKAKI KPK Wijanarko telah memberi peringatan terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan merupakan kutipan langsung dari Wijanarko

dan disusun dari awal paragraf hingga akhir paragraf dengan berkesinambungan. Seluruh pendapat dalam artikel berita ini pada dasarnya dapat mengerucut pada satu pandangan yakni permintaan agar Pilkada 2020 dapat ditinjau ulang mengingat pandemi virus Covid-19 masih berlangsung.

Struktur Retoris, Pada bagian ini Tempo.co banyak menggunakan ungkapan dan istilah-istilah politik, antara lain Politik Uang, Legitimasi, Kooptasi, Bansos Berbalut Kampanye, Klaster, Acara Olahraga Sejagat. Jika dijabarkan secara mendetail, istilah “Politik Uang” berarti suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang dengan uang yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil suara. Lalu “Legitimasi” adalah pernyataan yang sah menurut undang-undang, “Kooptasi” adalah diterimanya unsur-unsur baru berupa kepemimpinan dalam suatu organisasi/kelompok sosial untuk menghindari keguncangan atau konflik pada kelompok tersebut, “Bansos berbalut Kampanye” dimaksudkan kepada kegiatan bantuan sosial yang disertai kampanye terhadap salah satu kubu, “Klaster” dalam artikel ini digunakan untuk menyatakan satu kelompok yang terpapar virus Covid-19, dan “Acara Olahraga Sejagat” yang merujuk kepada *event* Olimpiade yang diikuti oleh seluruh penjuru negara di dunia. Dalam artikel ini, Tempo.co menggunakan foto jari kelingking yang dicelupkan ke dalam tinta berwarna ungu, ini merupakan simbol bahwa orang tersebut sudah sah dalam memberikan suaranya. Foto tersebut digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung tema artikel berita.

Tabel 3.2

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2 Pemberitaan *Tempo.co*

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Komnas HAM Beberkan Alasan Pemerintah Harus Tunda Pilkada 2020
	<i>Lead</i>	Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah mengatakan ada beberapa alasan kenapa pemerintah sebaiknya menunda Pilkada 2020.
	Latar Informasi	Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 dari sisi regulasi dan tindakan.
	Kutipan Sumber	<p>Komisioner Komnas HAM, Hairansyah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itu mensyaratkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi dan bisa dilanjutkan kalau ini sudah berakhir. Jadi ada syarat UU yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan. • Terutama saat pendaftaran kemarin kita bisa melihat secara regulasi dan institusi, pencegahan kerumunan itu hampir tidak bisa dilakukan. • Sejauh penerapan status kawasan belum diterapkan, maka penerapan sanksi-sanksi sebagaimana diatur UU Kekarantinaan sangat sulit dilaksanakan. • Kedua, dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar yaitu pilkada yang di dalamnya ada kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan • Ini penting menjadi catatan, mengapa kita perlu melihat apakah Pilkada bisa dilanjutkan atau tidak.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis di dalam berita.
	Penutup	Pernyataan dari Hairansyah yang menyebutkan bahwa ada dua situasi yang menyatu dalam persoalan Pilkada 2020,

		pertama adalah Pemerintah dianggap tidak mampu merespon COVID-19 baik dari segi regulasi maupun tindakan, kedua adalah event Pilkada berpotensi menciptakan kerumunan orang banyak.
Skrip	What	Alasan pemerintah harus menunda Pilkada 2020
	Where	Jakarta
	When	18 September 2020
	Who	Komisioner Komnas HAM, Hairansyah
	Why	Pemerintah tidak mampu memastikan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 berjalan dengan aman.
	How	Tidak ada.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf dimulai dengan pernyataan dari Hairansyah yang memaparkan alasan-alasan Pilkada di tengah pandemi harus ditunda, kemudian diikuti dengan pernyataan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Lalu ditutup dengan pertanyaan kepada Pemerintah tentang pentingnya Pilkada yang tetap dilaksanakan di tengah Pandemi.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Gambar ilustrasi artikel menggunakan foto seorang petugas TPS dengan atribut protokol kesehatan yang menyemprotkan disinfektan pada saat simulasi pemungutan suara.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Komnas HAM Beberkan Alasan Pemerintah Harus Tunda Pilkada 2020”. Dari judul tersebut Tempo membawa pembaca berpikir bahwa penundaan Pilkada bukan hal sepele, sehingga Tempo mengutip alasan-alasan yang disampaikan oleh Komnas HAM sebagai penguat fakta bahwa memang Pilkada 2020 semestinya ditunda. Meskipun tidak ada opini dari Tempo dalam artikel ini namun Tempo hanya mengutip dari satu narasumber yaitu

Komisioner Komnas HAM, Hairansyah. Tempo menekankan kutipan dari Hairansyah yang mengatakan pemerintah dan penyelenggara pemilu belum mampu dalam mengatasi penyebaran Covid-19 baik secara regulasi maupun institusi dalam 3 paragraf, yaitu ada paragraf 4, paragraf 5 dan paragraf 11.

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Alasan Pemerintah harus menunda Pilkada 2020. Kemudian (*Why*) unsur ini menjadi jawaban mengapa narasumber yaitu Komisioner Komnas HAM, Hairansyah mengimbau pemerintah agar menunda Pilkada 2020 dengan alasan yang disebutkan. Unsur ini menjelaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara tidak mampu secara regulasi dan institusi untuk memastikan dilaksanakannya protokol kesehatan saat dilangsungkannya Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Unsur (*Who*) juga cukup berperan penting dalam artikel ini, dengan status narasumber yang menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM, Tempo dapat menarik simpati pembaca karena alasan-alasan untuk menunda Pilkada 2020 yang ada di dalam artikel datang dari pihak yang mempedulikan Hak Asasi Manusia. Selain itu, unsur yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*), tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, berita pada artikel ini menggunakan pernyataan Hairansyah dalam penulisan artikel secara keseluruhan. Tempo menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Paragraf demi paragraf, Tempo memasukkan pernyataan Hairansyah terkait alasan-alasan penundaan Pilkada 2020.

Struktur Retoris, pada artikel ini, Tempo.co memasang foto seorang petugas TPS dengan alat kesehatan yang sedang melakukan penyemprotan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara di TPS. Foto tersebut sebagai pelengkap untuk mendukung tema artikel berita dan menekankan perihal isu Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.

Tabel 3.3

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3 Pemberitaan *Tempo.co*

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Minta Pilkada 2020 Ditunda, Kemitraan: Pemerintah dan KPU Menutup Mata
	<i>Lead</i>	Keputusan para pemangku kepentingan yang tetap menyepakati penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diadakan pada 9 Desember 2020 mendapatkan penolakan dari berbagai aliansi masyarakat sipil.
	Latar Informasi	Keputusan DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu yang terus melanjutkan tahapan pilkada 2020.
	Kutipan Sumber	<p>Kemitraan, Wahidah Suaib</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan ini nyata melukai hati masyarakat. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap suara nyata masyarakat untuk menunda Pilkada 2020. Padaahal, persoalan regulasi itu diatur di UU Pilkada. Sementara UU Pilkada yang berlaku sama sekali tidak mengatur detail teknis dan manajemen pelaksanaan pilkada yang harus sesuai keperluan pandemi. Artinya, tidak (ada) perbaikan regulasi hanya dilakukan dalam KPU, tapi harus dilakukan pada level UU Pilkada. Penundaan pilkada perlu dilakukan setelah (sudah) menyiapkan regulasi dan cermat untuk melaksanakan pilkada di kondisi pandemi.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
Penutup	Pernyataan Wahidah yang meminta para pemangku kepentingan agar menunda pilkada sampai situasi pandemi dapat terkendali dengan pemetaan yang jauh lebih detail.	

Skrip	What	Kemitraan menolak Pilkada 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.
	Where	Tidak tertera lokasi pasti dalam artikel ini. Pernyataan narasumber didapatkan melalui webinar.
	When	22 September 2020
	Who	Wahidah Suaib
	Why	Belum ada regulasi yang dapat mengatur detail teknis dan manajemen pelaksanaan yang harus sesuai keperluan pandemi.
	How	Tidak ada.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Tempo menekankan pernyataan langsung dan tidak langsung dari Wahidah mewakili dari berbagai aliansi masyarakat sipil yang menolak pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang menjelaskan beberapa poin inti yang mendasari penolakan tersebut.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Melukai Hati, Menutup Mata dan Telinga • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto dari Wahidah Suaib.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Minta Pilkada 2020 Ditunda, Kemitraan: Pemerintah dan KPU Menutup Mata”. Dari judul tersebut Tempo memberikan kesan bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu seolah bersikap tidak acuh dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia dan dunia, kata “menutup mata” merujuk kepada maksud mengabaikan dengan sengaja. Pemerintah dan penyelenggara pemilu seolah mengabaikan fakta bahwa pandemi virus Covid-19 masih berlangsung dan tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada. Terdapat penolakan dari kelompok aliansi masyarakat sipil terhadap Keputusan DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu yang tetap melanjutkan Pilkada. Kata “menutup mata” sebenarnya bukan berasal dari

Tempo sendiri melainkan dari pernyataan salah satu perwakilan aliansi masyarakat sipil yang disampaikan oleh Wahidah, dari Kemitraan. Kutipan tersebut terdapat pada paragraf 2 dalam artikel. Pada paragraf penutup Tempo mencantumkan kutipan dari Wahidah yang meminta pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menunda Pilkada sampai situasi pandemi dapat terkendali dengan pemetaan yang lebih detail.

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Kemitraan menolak Pilkada 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Kemudian unsur (*Why*) Belum ada regulasi yang dapat mengatur detail teknis dan manajemen pelaksanaan yang harus sesuai keperluan pandemi. Unsur ini menjelaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu belum menyiapkan regulasi yang tepat untuk menjamin kesehatan masyarakat saat dilangsungkannya Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, unsur yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*), tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, berita pada artikel ini menggunakan pernyataan Wahidah Suaib dalam penulisan artikel secara keseluruhan. Tempo menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Paragraf demi paragraf, Tempo memasukkan pernyataan Wahidah terkait alasan-alasan penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Struktur Retoris, Dalam artikel ini, terdapat dua kata ungkapan, antara lain adalah “Melukai Hati” dan “Menutup Mata dan Telinga”. Melukai Hati memiliki makna masyarakat yang merasa seolah dikhianati oleh DPR yang merupakan wakil rakyat namun membuat keputusan yang dapat membahayakan rakyat. Menutup Mata dan Telinga memiliki makna pemerintah dan penyelenggara pemilu seolah berpura-pura tidak melihat situasi pandemi Covid-19 dan tetap melaksanakan Pilkada 2020 padahal dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Dua kata tersebut terdapat dalam kutipan narasumber di paragraf ke-2 di dalam artikel. Dalam artikel tersebut Tempo menggunakan foto Wahidah Suaib dari Kemitraan saat sedang berbicara dengan *microphone* dalam forum diskusi. Foto tersebut tidak bermakna apa-apa dan hanya digunakan untuk mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.4

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4 Pemberitaan *Tempo.co*

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Headline/Judul	Mahfud MD Jelaskan 4 Alasan Pemerintah Ngotot Pilkada 2020 Jalan Terus
	Lead	Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pertimbangan keputusan tidak menunda Pilkada 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020, salah satunya karena pemerintah tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan.
	Latar Informasi	Pertimbangan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020.
	Kutipan Sumber	Menko Polhukam, Mahfud Md <ul style="list-style-type: none"> • Karena Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. • Di negara-negara yang serangan COVID-nya lebih besar seperti Amerika sekalipun, Pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara juga berlangsung, pemilu tidak ditunda. • Nah, yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi masih masifnya penularan COVID-19 seperti dikhawatirkan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok atau masyarakat yang menginginkan agar ditunda. Penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
Penutup	Pernyataan Mahfud Md meminta publik dan pemerintah agar bekerja sama dalam menegakkan protokol kesehatan dan juga penegasan hukum.	

Skrip	What	Alasan Pilkada harus tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi Covid-19.
	Where	Tidak tertera lokasi pasti dalam artikel ini. Pernyataan narasumber didapatkan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak secara virtual.
	When	22 September 2020
	Who	Mahfud Md
	Why	Karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan <i>COVID-19</i> akan berakhir.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Tempo menggunakan kutipan langsung dari Mahfud Md yang memberikan penjelasan kenapa Pilkada harus tetap dilaksanakan meski di tengah kondisi pandemi. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan yang menjabarkan alasan-alasan mengapa Pilkada mesti tetap berjalan. Kemudian ditutup dengan pernyataan akhir Mahfud Md yang mencontohkan sejumlah negara yang tetap menggelar pemilihan meski di tengah wabah.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Ngotot • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto dari Mahfud Md berdiri bersama Ketua Kompolnas dan delapan anggotanya pada saat rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam pada 19 Agustus 2020.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Mahfud MD Jelaskan 4 Alasan Pemerintah Ngotot Pilkada 2020 Jalan Terus”. Dari judul tersebut Tempo memeberikan kesan bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu tetap teguh dengan pendiriannya untuk menyelenggarakan Pilkada 2020, kata “Ngotot” ditulis sebagai penekanan bahwa pemerintah bersikeras menyelenggarakan Pilkada meskipun tahu

pandemi *COVID-19* masih berlangsung. Kata “ngotot” dalam judul berita merupakan kata yang ditulis sendiri oleh Tempo dan tidak terdapat di dalam isi artikel. Pada bagian *lead* berita langsung berisi penjelasan alasan-alasan dari narasumber sesuai dengan judul yang tertulis. Tempo hanya menggunakan satu narasumber sebagai sumber kutipan berita dalam artikel ini yaitu dari Menko Polhukam, Mahfud Md. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan dari Mahfud Md yang meminta agar masyarakat, kelompok dan juga pemerintah bekerja sama dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dan juga penegakan hukum yang tegas agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar.

Struktur Skrip, dalam artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Alasan Pilkada harus tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Kemudian unsur (*Why*) Karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan pandemi *COVID-19* akan berakhir. Unsur ini menjelaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara mantap menyelenggarakan Pilkada karena tidak dapat memastikan kapan pandemi berakhir. Selain itu, unsur yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*), tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan dari satu narasumber yakni Mahfud Md, dalam penulisan artikel secara keseluruhan. Tempo memakai kutipan langsung dan tidak langsung dalam artikel berita tersebut. Tempo menggunakan pernyataan dari Mahfud Md tentang alasan pemerintah bersikeras menyelenggarakan Pilkada 2020.

Struktur Retoris, Dalam artikel ini, terdapat sebuah ungkapan yang digunakan Tempo yaitu “Ngotot”. Kata “Ngotot” digunakan untuk ungkapan kepada seseorang yang keras kepala atau tidak mau mengalah dan bersikeras mempertahankan keputusannya. Dalam artikel tersebut, pemerintah dianggap bersikeras terhadap keputusannya menyelenggarakan Pilkada padahal pandemi *COVID-19* belum berakhir. Dalam artikel tersebut Tempo menggunakan foto Mahfud Md yang berdiri berpidato diatas mimbar bersama Ketua Kompolnas dan delapan anggotanya pada saat rapat perdana di kantor Kemenko Polhukam pada 19 Agustus 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.5

Analisis Framing *Pan* dan *Kosicki* Berita 5 Pemberitaan Tempo.co

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i> /Judul	Pilkada 2020: Tambal Sulam Aturan Melarang Kerumunan
	<i>Lead</i>	Pelanggaran protokol kesehatan kembali terjadi dalam tahapan kampanye Pilkada 2020 yang berlangsung sejak Ahad, 26 September lalu.
	Latar Informasi	Pelanggaran protokol kesehatan ketika dalam tahapan kampanye.
	Kutipan Sumber	<p>Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di hari pertama kampanye, terdapat delapan kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan. <p>Dewan Penasihat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman paslon dan timnya terhadap protokol kesehatan terbukti buruk. Aulia Rachman misalnya, sudah cara pakai masker salah, berdiri berdekatan, semua yang di sampingnya menurunkan masker. • Karena ini kejahatan yang membahayakan nyawa manusia. <p>Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang harus dilakukan adalah mencari cara-cara yang sesuai situasi pandemi. Ini yang dilakukan kan bukan itu, lebih kepada model tambal sulam saja. • Dugaan saya (pelanggaran protokol kesehatan) akan meningkat. Di situasi pandemi yang masih mengkhawatirkan, ini akan memperparah.

		<p>Menko Polhukam, Mahfud Md</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah mendengarkan dan mendiskusikan secara mendalam kemarin, Presiden berpendapat bahwa pilkada enggak perlu ditunda. <p>Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi. Dan ini juga terkait dengan Pilkada.
	Pernyataan/Opini	Meskipun sudah ada ketentuan yang ditetapkan yang mengatur kampanye dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, nyatanya sejumlah pasangan calon kepala daerah masih melanggar ketentuan terkait kampanye yang diselenggarakan.
	Penutup	Bawaslu menyebutkan sejak waktu pendaftaran beberapa pasangan calon melanggar protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan. Ditambah prediksi dari Hadar Nafis Gumay yang memperkirakan pelanggaran protokol kesehatan akan intens dan meningkat menjelang pemungutan suara.
Skrip	What	Kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah dalam tahapan kampanye Pilkada 2020.
	Where	Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, Kaimana, dan Medan.
	When	26 September 2020
	Who	Bobby Nasution dan Aulia Rachman.
	Why	Karena menghadiri kampanye yang diselenggarakan tim sukses mereka.

	How	Aulia Rachman yang terlihat menurunkan maskernya saat wawancara dengan wartawan. Beberapa tim sukses pun berdiri dekat di sampingnya dan sama-sama menurunkan masker.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf dimulai dengan pernyataan dari Bawaslu terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan beberapa pasangan calon kepala daerah. Kemudian didukung dengan kutipan langsung dari pihak yang menyatakan Pilkada harus ditunda. Lalu di akhir berita dibantah dengan kutipan langsung dari pihak Pemerintah yang menyatakan tidak bisa menunda Pilkada didukung oleh pernyataan dari Jubir Satgas <i>COVID-19</i> .
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Tambal Sulam • Tidak ada gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Pilkada 2020: Tambal Sulam Aturan Melarang Kerumunan”. Dari judul tersebut Tempo memberikan kesan kepada khalayak bahwa aturan melarang kerumunan hanya sebagai penambahan dari aturan yang sudah ada. *Lead* dalam artikel ini tidak berkesinambungan dengan judul artikel. Pada bagian *Lead* menjelaskan tentang pelanggaran protokol kesehatan yang kembali terjadi saat tahapan masa kampanye Pilkada 2020 berlangsung. Dalam artikel ini, Tempo merangkum kutipan sumber dari beberapa narasumber. Tempo mencantumkan lima narasumber sebagai sumber kutipan berita dalam artikel ini yaitu dari Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Dewan Penasihat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini, Pendiri *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Juru bicara Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*, Wiku Adisasmito. Pada artikel tersebut terdapat opini dari Tempo sendiri, dalam opininya Tempo menyebutkan meskipun sudah ada ketentuan yang ditetapkan yang mengatur kampanye dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, nyatanya sejumlah pasangan calon kepala daerah masih melanggar ketentuan terkait kampanye yang diselenggarakan. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan dari Bawaslu catatan pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dengan menyebabkan kerumunan sejak waktu pendaftaran. Di akhir paragraf

ditambahkan prediksi dari Hadar Nafis Gumay yang memperkirakan pelanggaran protokol kesehatan akan intens dan meningkat menjelang pemungutan suara.

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah dalam tahapan kampanye Pilkada 2020. Kemudian unsur (*Why*) Karena pasangan calon kepala daerah tersebut menghadiri kampanye yang diselenggarakan oleh tim sukses mereka. Unsur ini menjelaskan bahwa pasangan calon kepala daerah tertangkap basah ketika melanggar protokol kesehatan dengan menghadiri acara yang melibatkan kerumunan massa. Selain itu, unsur (*How*) Aulia Rachman dan beberapa tim suksesnya berdiri berdekatan dan sama-sama menurunkan masker. Dari unsur ini dapat diketahui bagaimana kronologi dari salah satu pasangan calon yang tertangkap tangan melanggar protokol kesehatan saat sedang kampanye Pilkada 2020.

Struktur Tematik, berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari lima narasumber yakni Fritz Edward Siregar, Titi Angraini, Hadar Nafis Gumay, Mahfud Md, dan Wiku Adisasmito. Pada penulisan dalam artikel tersebut, tempo memulai paragraf dengan pernyataan dari anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar yang mengungkapkan sejumlah pasangan calon di berbagai daerah melanggar protokol kesehatan, lalu didukung oleh pernyataan dari sejumlah narasumber lainnya. Kutipan pernyataan dari Mahfud Md dan Wiku Adisasmito hadir sebagai pelengkap dalam artikel tersebut agar berita dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Tempo menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut.

Struktur Retoris, Dalam artikel ini, terdapat sebuah ungkapan yang digunakan Tempo yaitu “Tambal Sulam”. Kata “Tambal Sulam” disebutkan dalam sumber kutipan dari Hadar Nafis Gumay. Dalam kutipan tersebut ia mengatakan,

“Yang harus dilakukan adalah mencari cara-cara yang sesuai situasi pandemi. Ini yang dilakukan ‘kan bukan itu, lebih kepada model tambal sulam saja”

Dari kutipan tersebut “Tambal Sulam” disini dapat diartikan sebagai cara pemerintah dalam menyikapi aturan yang dilanggar dengan menambahkan aturan lainnya bukan dengan mengubah atau membuat aturan baru yang sesuai. Dalam artikel tersebut Tempo tidak menggunakan foto atau ilustrai apapun.

Tabel 3.6

Analisis Framing *Pan* dan *Kosicki* Berita 6 Pemberitaan Tempo.co

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i> /Judul	LP3ES Sebut 5 Resiko Jika Pilkada 2020 Tetap Diadakan di Tengah Pandemi
	<i>Lead</i>	Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES Wijayanto mengatakan kepercayaan masyarakat dapat turun lebih jauh, jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 secara langsung tetap diadakan di tengah pandemi <i>COVID-19</i> .
	Latar Informasi	Tiga anggota KPU teridentifikasi positif <i>COVID-19</i> .
	Kutipan Sumber	<p>Direktur LP3ES, Wijayanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya ada lima resiko yang membayang-bayangi pilkada esok, yakni resiko nyawa, buruknya sosialisasi, tergerusnya <i>trust</i>, kualitas pemilu, dan demokrasi yang buruk. • Pilkada adalah proses di mana pemimpin meminta suara rakyat untuk dipilih, maka akan menjadi ironi jika memaksakan pilkada yang dapat menjadi ritual pembunuhan massal <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum, belum ada pikiran itu
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Pernyataan bahwa Ketua KPU, Arif Budiman dan dua anggota lainnya terkonfirmasi positif <i>COVID-19</i> pada tes usap Jumat lalu.
Skrip	What	Resiko yang terjadi jika Pilkada tetap dilangsungkan di tengah pandemi.

	Where	Jakarta.
	When	1 Oktober 2020
	Who	Wijayanto, Arif Budiman
	Why	Kepercayaan masyarakat akan turun
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Pernyataan dari Wijayanto yang menyebutkan beberapa resiko jika Pilkada tetap dilakukan didukung oleh hasil survei yang menyatakan publik sepakat agar Pilkada 2020 diundur. Kemudian ditutup dengan fakta bahwa Tiga orang dari KPU positif COVID-19.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Ritual Pembunuhan Massal. • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto situasi pemungutan suara di TPS.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “LP3ES Sebut 5 Resiko Jika Pilkada 2020 Tetap Diadakan di Tengah Pandemi”. Dari judul tersebut Tempo memberikan kesan kepada khalayak bahwa Pilkada 2020 akan menimbulkan resiko jika tetap diselenggarakan. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Tempo merangkum kutipan sumber dari dua narasumber, yaitu dari Direktur LP3ES Wijayanto, dan Ketua KPU Arif Budiman. Direktur LP3ES, Wijayanto dalam kutipannya menyebutkan,

“Setidaknya ada lima resiko yang membayang-bayangi pilkada esok, yakni resiko nyawa, buruknya sosialisasi, tergerusnya trust, kualitas pemilu, dan demokrasi yang buruk.”

Tempo juga menyertakan survei yang dilakukan Wijayanto, ada sebanyak 74,7 persen masyarakat sepakat jika Pilkada 2020 ditunda. Artikel tersebut ditutup dengan fakta yang menginformasikan bahwa Ketua KPU, Arif Budiman dan dua anggota lainnya terkonfirmasi positif *COVID-19* pada tes usap hari Jumat, 24 September 2020

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara mendetail bagaimana cara Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Resiko yang terjadi jika Pilkada tetap dilangsungkan di tengah pandemi. Kemudian unsur (*Why*) Karena kepercayaan masyarakat akan turun lebih jauh. Unsur ini menjelaskan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah karena tetap menyelenggarakan Pilkada meskipun pandemi virus *COVID-19* masih berlangsung. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa tiga pejabat KPU yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada, terkonfirmasi positif terpapar virus *COVID-19*. Selain itu, unsur yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*), tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari dua narasumber yakni Wijayanto dari LP3ES dan Arif Budiman dari KPU. Pada penulisan dalam artikel tersebut, tempo memulai paragraf dengan pernyataan dari Wijayanto yang menyebutkan 5 resiko jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan. Salah satu resiko tersebut adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Padahal menurut survei LP3ES, sebanyak 74,7 persen masyarakat sepakat Pilkada 2020 harus ditunda. Kutipan pernyataan dari Arif Budiman hadir sebagai penegas bahwa pemerintah dan penyelenggara pemilu tidak berniat mengundurkan atau bahkan menunda Pilkada, meskipun pada faktanya ia dan kedua anggota lainnya dinyatakan positif terpapar virus *COVID-19*. Tempo menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut.

Struktur Retoris, Dalam artikel ini, terdapat sebuah ungkapan yang digunakan Tempo yaitu “Ritual Pembunuhan Massal”. Kata “Ritual Pembunuhan Massal” disebutkan dalam sumber kutipan dari Wijayanto. Dalam kutipan tersebut ia mengatakan,

“Pilkada adalah proses di mana pemimpin meminta suara rakyat untuk dipilih, maka akan menjadi ironi jika memaksakan Pilkada yang dapat menjadi ritual pembunuhan massal.”

Dari kutipan tersebut “Ritual Pembunuhan Massal” disini dapat dipahami sebagai kiasan yang menggambarkan apa yang terjadi jika Pilkada 2020 diselenggarakan secara langsung, karena masyarakat akan datang ke TPS dan membuat kerumunan yang dapat mempercepat penyebaran virus *COVID-19* sehingga membahayakan keselamatan masyarakat. Pada artikel ini, Tempo menggunakan foto ilustrasi TPS pada Pemilu sebelumnya. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.7

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 7 Pemberitaan Tempo.co

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Minta Pilkada 2020 Ditunda, ICW: Demi Keselamatan Warga dan Tekan Kecurangan
	<i>Lead</i>	Indonesian Corruption Watch menilai langkah pemerintah tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi dengan angka positif <i>COVID-19</i> yang masih tinggi sangat beresiko. Mereka menyebut pemerintah tidak memprioritaskan keselamatan warga, kendati celah menunda ada.
	Latar Informasi	Jumlah kasus positif <i>COVID-19</i> masih terus tinggi.
	Kutipan Sumber	Peneliti ICW, Egi Primayogha <ul style="list-style-type: none"> • Di tengah jumlah kasus positif <i>COVID-19</i> yang semakin marak, keputusan itu patut dipertanyakan. Pelaksanaan Pilkada 2020 mesti ditunda demi keselamatan warga dan menekan potensi kecurangan yang akan terjadi. • Dengan begitu, maka risiko penularan akan semakin tinggi. • Bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak selalu lancar. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh

		<p>para kandidat untuk melakukan praktik <i>vote buying</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuat diduga terdapat kepentingan lain di balik keputusan tersebut
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Egi Primayogha menyebutkan ada jalan untuk menunda Pilkada. Undang-undang sudah menegaskan bahwa Pilkada bisa ditunda dan dijadwal ulang apabila pandemi <i>COVID-19</i> belum berakhir. Kemudian ditutup dengan dugaan hadirnya kepentingan lain yang mencampuri keputusan.
Skrip	What	Penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus <i>COVID-19</i> dengan penambahan kasus yang terus memburuk dapat menyebabkan berbagai dampak negatif.
	Where	Jakarta
	When	2 Oktober 2020
	Who	Egi Primayogha
	Why	Angka positif <i>COVID-19</i> yang masih tinggi dan kondisi warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut menjadi celah praktek politik uang.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf disusun berdasarkan kutipan langsung dari Egi Primayogha yang menyebutkan dampak negatif jika Pilkada tetap digelar di tengah pandemi, dari Politik uang, hingga mengancam keselamatan warga dan dugaan campur tangan pihak lain yang memiliki kepentingan. Lalu dikembangkan dengan kutipan tidak langsung.

Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vote Buying</i> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto situasi pemungutan suara di TPS
---------	----------------------------------	---

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Minta Pilkada 2020 Ditunda, ICW: Demi Keselamatan Warga dan Tekan Kecurangan”. Dari judul tersebut Tempo memberikan kesan kepada khalayak bahwa Pilkada 2020 akan mengancam keselamatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecurangan. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Tempo hanya menggunakan satu sumber kutipan, yaitu dari Peneliti ICW, Egi Primayogha. Egi dalam kutipannya menyebutkan,

“Pelaksanaan Pilkada 2020 mesti ditunda demi keselamatan warga dan menekan potensi kecurangan yang akan terjadi.”

Hal tersebut berkaitan dengan jumlah kasus positif *COVID-19* masih terus tinggi. Artikel ditutup dengan Pasal 201A ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 2 tahun 2020 menegaskan bahwa Pilkada dapat dijadwalkan ulang. Lalu, kemudian diakhiri dengan kutipan Egi yang menduga ada kepentingan lain dibalik keputusan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi *COVID-19*.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi yang semakin memburuk akan menyebabkan berbagai dampak negatif. Kemudian unsur (*Why*) Karena tingginya angka positif *COVID-19* dan kondisi warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut menjadi celah praktek politik uang. Unsur (*Who*) disini juga menarik karena narasumber dalam artikel ini adalah Peneliti dari *Indonesian Corruption Watch*, yang memang mempunyai misi mengawasi potensi terjadinya aksi korupsi termasuk politik uang di Indonesia. Selain itu, unsur yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*), tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan dari satu narasumber yakni Egi Primayogha dalam penulisan artikel secara keseluruhan. Tempo memakai kutipan langsung dan tidak langsung dalam artikel tersebut. Tempo

menggunakan pernyataan Egi Primayogha terkait resiko dan potensi buruk yang bisa terjadi jika Pilkada 2020 tidak ditunda.

Struktur Retoris, Dalam artikel ini, terdapat sebuah ungkapan bahasa Inggris yang digunakan oleh narasumber yaitu *vote buying*. Kata *vote buying* disebutkan dalam sumber kutipan dari Egi Primayogha. Dalam kutipan tersebut ia mengatakan,

“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak selalu lancar. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying.”

Dari kutipan tersebut *vote buying* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Membeli Suara”, secara sederhana artinya praktek politik uang dengan cara memberikan bantuan finansial kepada calon pemilih dengan syarat suara dari calon pemilih akan diberikan kepada si pemberi bantuan. Pada artikel ini, Tempo menggunakan foto ilustrasi seorang pemilih yang sedang menjalani proses pemilihan di TPS. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.8

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 8 Pemberitaan Tempo.co

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Bawaslu Sebut Masih Ada Pelanggaran Protokol COVID-19 Saat Kampanye
	<i>Lead</i>	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Abhan menyatakan pelanggaran terhadap protokol COVID-19 masih ditemukan saat pelaksanaan kampanye Pilkada 2020.
	Latar Informasi	Masih ada pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye.
	Kutipan Sumber	Ketua Bawaslu RI, Abhan <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran di protokol kesehatan masih ada ya. Jadi, kampanye melebihi 50 orang, kemudian, misalnya tidak melebihi 50 orang

		<p>tetapi tidak memakai masker, tidak jaga jarak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sampai digugurkan (diskualifikasi). Di Undang-Undang Pilkada enggak ada ketentuan pelanggaran prokes (protokol kesehatan) itu sampai diskualifikasi, enggak ada. • Dari paparan Satgas <i>COVID-19</i> terakhir kemarin bahwa kecenderungan daerah yang berpilkada itu malah turun (angka penularan <i>COVID-19</i>)
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Pernyataan dari Abhan yang menyebut bahwa KPU telah menerbitkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang mengatur pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Skrip	What	Masih ada pelanggaran protokol kesehatan pada saat kampanye.
	Where	Purwokerto.
	When	30 November 2020
	Who	Abhan
	Why	Karena sanksi yang diberikan tidak tegas.
	How	Kampanye melebihi 50 orang atau kurang dari 50 orang tetapi tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf disusun dengan pengakuan Bawaslu tentang adanya pelanggaran protokol kesehatan <i>COVID-19</i> pada saat kampanye dan menyebutkan jenis pelanggarannya. Kemudian diikuti dengan kutipan Bawaslu yang melempar tanggung jawab kepada Satgas Penanganan <i>COVID-19</i> . Di akhir

		paragraf berita ditutup dengan himbauan Bawaslu agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Ketua Bawaslu didampingi 4 anggotanya saat memberikan keterangan pers di gedung Bawaslu, Juli lalu.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Bawaslu Sebut Masih Ada Pelanggaran Protokol *COVID-19* Saat Kampanye”. Dari judul tersebut Tempo memberikan kesan kepada khalayak bahwa masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pada saat masa kampanye Pilkada 2020 berlangsung. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Tempo hanya menggunakan satu sumber kutipan, yaitu dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Abhan. Dalam kutipannya Abhan mengatakan

“Pelanggaran di protokol kesehatan masih ada ya. Jadi, kampanye melebihi 50 orang, kemudian, misalnya tidak melebihi 50 orang tetapi tidak memakai masker, tidak jaga jarak.”

Kemudian menurut Abhan, pelanggar protokol kesehatan tidak didiskualifikasi dari Pilkada, karena tidak disebutkan dalam Undang-undang. Namun akan tetap diberikan sanksi, yaitu berupa pembubaran kegiatan kampanye dan pengurangan jatah jadwal kampanye. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan Abhan yang menyebutkan bahwa KPU telah menerbitkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang mengatur pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi *COVID-19*.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Masih ada pelanggaran protokol kesehatan pada saat masa kampanye. Kemudian unsur (*Why*) Karena sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan dinilai tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Bukan berupa diskualifikasi namun hanya pembubaran kegiatan kampanye dan pengurangan jatah kampanye. Selain itu, unsur lain yang ditonjolkan dalam artikel ini adalah (*How*) yang menjelaskan kronologi pelanggaran protokol kesehatan yakni kampanye yang melebihi

50 orang atau kurang dari 50 orang tetapi tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan dari satu narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni Abhan selaku Ketua Bawaslu. Tempo memasukkan pernyataan Abhan terkait pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi ketika masa kampanye berlangsung dan bagaimana Abhan menyikapi pelanggaran tersebut.

Struktur Retoris, Pada artikel ini, Tempo menggunakan foto yang menampilkan Ketua Bawaslu didampingi oleh 4 anggotanya saat memberikan keterangan pers di gedung Bawaslu, bulan Juli 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.9

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 9 Pemberitaan Tempo.co

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020 dari Aspek Pandemi, Ini Daftarnya
	<i>Lead</i>	Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020. Salah satu yang kerawanan yang dipetakan menyangkut situasi pandemi <i>COVID-19</i> di daerah terkait.
	Latar Informasi	Daftar indeks kerawanan Pilkada 2020 dari aspek Pandemi <i>COVID-19</i> .
	Kutipan Sumber	Anggota Bawaslu, M. Afifuddin <ul style="list-style-type: none"> • Dalam konteks pandemi ini kami juga memasukkan beberapa hal yang menjadi indikator kerawanan. • Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan perundang-undangan.

	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Pernyataan data dari Afifuddin yang menyebutkan 62 wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dan 199 wilayah dengan tingkat kerawanan sedang. Tak ada wilayah dengan kerawanan rendah dari segi aspek pandemi <i>COVID-19</i> . Rilis data daftar sepuluh wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi dari aspek bahaya <i>COVID-19</i> .
Skrip	What	Pandemi <i>COVID-19</i> memperparah tingkat kerawanan Pilkada 2020.
	Where	Jakarta.
	When	6 Desember 2020
	Who	M. Afifuddin
	Why	Karena minimnya kepedulian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan perundang-undangan.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf pada artikel berita ini hanya diisi oleh pernyataan dari Bawaslu yang merilis daftar Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang mencakup tiga indikator. Selain itu Bawaslu juga merilis daftar provinsi yang paling rawan dari aspek pandemi <i>COVID-19</i> dan daftar kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi dari aspek bahaya wabah corona.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Ketua Bawaslu didampingi 4 anggotanya saat memberikan keterangan pers di gedung Bawaslu, Juli lalu.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020 dari Aspek Pandemi, Ini Daftarnya”. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Tempo hanya menggunakan satu sumber kutipan, yaitu dari Anggota Bawaslu, M. Afifuddin. Dalam kutipannya Afifuddin menjelaskan

“Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan perundang-undangan.”

Menurut Afifuddin, Dari sembilan provinsi yang menggelar Pemilihan Gubernur 2020, Kepulauan Riau menempati urutan teratas alias paling rawan dari aspek pandemi *COVID-19*, dengan skor 95,4. Berikut daftarnya:

1. Kepulauan Riau 95,4
2. Sumatera Barat 89,7
3. Jambi 87,4
4. Bengkulu 86,2
5. Kalimantan Tengah 79,3
6. Sulawesi Tengah 78,2
7. Kalimantan Selatan 73,6
8. Sulawesi Utara 73,6
9. Kalimantan Utara 67,8

Artikel ditutup dengan pernyataan data dari Afifuddin yang mengatakan ada 62 kabupaten/kota dengan kerawanan tinggi dan 199 kabupaten/kota dengan kerawanan sedang. Tak ada kabupaten/kota dengan kerawanan rendah dari aspek pandemi *COVID-19*. Berikut adalah sepuluh kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi dari aspek bahaya wabah *corona*.

1. Kabupaten Teluk Wondama
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten Natuna
4. Kabupaten Purworejo
5. Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Kabupaten Morowali Utara
7. Kota Semarang
8. Kabupaten Tuban

9. Kabupaten Tasikmalaya

10. Kabupaten Purbalingga

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Pandemi *COVID-19* memperparah tingkat kerawanan Pilkada 2020. Kemudian unsur (*Why*) Karena kurangnya kesadaran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap undang-undang. Selain itu, unsur lain yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*) tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan dari satu narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Anggota Bawaslu, M. Afifuddin. Tempo juga menggunakan kutipan tidak langsung dalam artikel tersebut. Tempo memasukkan pernyataan Abhan terkait indeks kerawanan Pilkada 2020 yang meningkat akibat pandemi virus *COVID-19*. Tempo juga menyertakan data yang didapatkan dari pemaparan Afifuddin.

Struktur Retoris, Pada artikel ini, Tempo menggunakan foto yang menampilkan Ketua Bawaslu didampingi oleh 4 anggotanya saat memberikan keterangan pers di gedung Bawaslu, bulan Juli 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.10

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 10 Pemberitaan Tempo.co

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Perludem: Pilkada 2020 Lancar karena Diawasi Ketat Masyarakat Sipil
	<i>Lead</i>	Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 berjalan relatif lancar dan baik karena penyelenggara diawasi ketat masyarakat sipil.
	Latar Informasi	Peran masyarakat dalam kelancaran Pilkada 2020
	Kutipan Sumber	Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini <ul style="list-style-type: none"> • Betul-betul dalam pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh masyarakat sipil, organisasi pegiat pemilu, media massa, komunitas kesehatan, dan publik. • Di 2019 kita meraba-raba bahwa ada hal yang baru, tapi kita tidak membayangkan risiko. Sehingga KPU bekerja dengan desain yang mereka buat, sementara publik tidak punya bayangan risiko soal beban, lalu ancaman kelelahan.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Ditutup dengan pernyataan data dari Titi Anggraini yang mengapresiasi dua pihak yang membantu melancarkan Pilkada 2020. Mereka adalah petugas KPPS dan para pemilih yang sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan ketat.
Skrip	What	Pilkada 2020 Lancar karena Diawasi Ketat Masyarakat Sipil.
	Where	Jakarta.

	When	12 Desember 2020
	Who	Titi Anggraini
	Why	Karena masyarakat menyadari aspek risiko penyelenggaraan Pilkada 2020.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf pada artikel ini berisi apresiasi Perludem terhadap masyarakat yang menyadari aspek resiko dari Pilkada 2020 sehingga mampu mengawasi Pilkada 2020 dengan ketat dan melakukan protokol kesehatan dengan baik sehingga Pilkada 2020 dapat berjalan lancar. Kemudian dihubungkan dengan pernyataan tidak langsung dari narasumber.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto petugas KPPS mengenakan atribut lengkap Alat Pelindung Diri di TPS.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Perludem: Pilkada 2020 Lancar karena Diawasi Ketat Masyarakat Sipil”. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Tempo hanya menggunakan satu sumber kutipan, yaitu dari Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Dalam kutipannya pada diskusi perspektif Indonesia, Titi Anggraini mengatakan,

”Betul-betul dalam pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh masyarakat sipil, organisasi pegiat pemilu, media massa, komunitas kesehatan, dan publik.”

Dengan adanya pandemi *COVID-19* membuat masyarakat lebih sadar akan resiko yang dihadapi ketika Pilkada diselenggarakan. Artikel tersebut ditutup dengan apresiasi dari Titi Anggraini selaku Anggota Dewan Pembina Perludem, terhadap pihak-pihak yang turut membantu dan berusaha menerapkan standar prosedur pemilihan sesuai protokol kesehatan demi kelancaran Pilkada 2020.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Tempo.co menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Pilkada 2020 Lancar karena Diawasi Ketat Masyarakat Sipil. Kemudian unsur (*Why*) Karena masyarakat menyadari aspek risiko penyelenggaraan Pilkada 2020. Unsur ini menjelaskan bahwa masyarakat ikut andil dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan terus mengawasi jalannya Pilkada secara ketat sehingga Pilkada 2020 dapat berjalan lancar. Selain itu, unsur lain yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*) tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan dari satu narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selain itu, Tempo menggunakan kutipan tidak langsung pada artikel tersebut. Tempo menggunakan pernyataan Titi Anggraini yang mengapresiasi tinggi dua pihak yaitu masyarakat sipil dan petugas KPPS dalam melancarkan Pilkada 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi virus *COVID-19*.

Struktur Retoris, Pada artikel ini, Tempo menggunakan foto yang menampilkan petugas KPPS mengenakan atribut lengkap Alat Pelindung Diri di TPS. Foto tersebut selain untuk mendukung isi berita juga bertujuan untuk menggambarkan situasi pemilihan umum dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

B. Analisis Framing Pan dan Kosicki terhadap Pemberitaan Kompas.com

Tabel 3.11

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung.
	<i>Lead</i>	Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menggelar kampanye langsung yang mempertemukan calon kepala daerah dan pemilih, meski Pilkada tahun ini digelar di situasi pandemi <i>COVID-19</i> .
	Latar Informasi	Tahapan kampanye tetap berjalan meski pandemi.
	Kutipan Sumber	<p>Ketua KPU, Arief Budiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang mengatur metode yang diperkenankan, kampanye rapat umum, kampanye terbuka, dan pertemuan terbatas. Jika melarang kalau KPU disengketakan bisa kalah. • Misalnya begini, ruangan pertemuan terbatas cukup menampung 50 orang, itu hanya boleh 25. • Lalu rapat umum, masih bolehkah rapat? Seperti apakah rapat umum? Kalau soal boleh masih boleh karena undang-undang memperbolehkan itu, tapi caranya yang nanti akan kami atur. • Ini yang sedang kami tuntaskan di dalam PKPU tentang tata cara Pemilu di masa bencana.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan informasi yang berisi tentang wacana Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada yang tadinya akan digelar pada 23 September namun, akibat

		wabah <i>COVID-19</i> diundur menjadi 9 Desember 2020.
Skrip	What	KPU tidak akan melarang kampanye langsung.
	Where	Jakarta.
	When	16 Juni 2020
	Who	Arief Budiman
	Why	Karena ketentuan tentang kampanye telah diatur dalam undang-undang nomer 10 tahun 2016.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf pada artikel berita ini berisi hubungan antar kalimat dari kutipan langsung dan tidak langsung dari Ketua KPU yang menjelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada dalam situasi pandemi. Kemudian pernyataan tersebut didukung dengan kutipan yang menyebutkan undang-undang yang mengatur jalannya Pilkada di tengah pandemi.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Ketua KPU, Arief Budiman yang sedang melakukan wawancara dan dikerumuni wartawan.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung”. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Kompas hanya menggunakan satu sumber kutipan, yaitu dari Ketua KPU, Arief Budiman. Dalam kutipannya pada diskusi diskusi virtual, Arief Budiman mengatakan,

“Misalnya begini, ruangan pertemuan terbatas cukup menampung 50 orang, itu hanya boleh 25.”

Dari situ dapat dipahami jika kampanye langsung yang mempertemukan calon kepala daerah dan pemilih akan tetap digelar, namun dengan pertemuan terbatas dan peserta yang dibatasi. Artikel tersebut ditutup dengan informasi yang berisi tentang wacana Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada yang tadinya akan digelar pada 23 September namun, akibat wabah *COVID-19* diundur menjadi 9 Desember 2020.

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) KPU tidak akan melarang kampanye langsung. Kemudian unsur (*Why*) Karena ketentuan tentang kampanye telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selain itu, unsur lain yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*) tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan langsung dan tidak langsung dari satu narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Ketua KPU, Arief Budiman. Kompas memasukkan pernyataan Arief Budiman yang menyatakan tidak akan melarang kampanye langsung. Karena ketentuan terkait kampanye sudah diatur undang-undang nomor 10 tahun 2016 sehingga Arief khawatir jika dilarang, mereka akan menyalahi aturan. Namun, tentunya kampanye untuk Pilkada 2020 akan tetap menerapkan protokol kesehatan agar mencegah penyebaran virus *COVID-19*.

Struktur Retoris, Pada artikel ini, Kompas menggunakan foto yang menampilkan Ketua KPU, Arief Budiman yang sedang melakukan wawancara dan dikerumuni wartawan. Foto tersebut diambil pada tanggal 28 Januari 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.12

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi.
	<i>Lead</i>	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, setidaknya ada empat alasan urgensi menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
	Latar Informasi	Urgensi penyelenggaraan Pilkada serentak.
	Kutipan Sumber	<p>Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang pertama KPU tentu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku. • Pilkada dilanjutkan sesuai keputusan bersama pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu. Untuk rekomendasi dari gugus tugas, surat yang disampaikan dijelaskan Pilkada bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. • Kemudian alasan ke-empat, soal tata kelola anggaran, ini juga mesti harus dipikirkan (jika menunda ke tahun berikutnya). <p>Anggota KPU, Viryan Aziz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika kami menunda Pilkada dulu berharap, ini bisa kita lanjutkan setelah <i>COVID-19</i> berakhir, namun seiring waktu WHO menyampaikan kesimpulan dan pandangannya bahwa pandemi global ini tidak akan mungkin berakhir dalam waktu singkat, <i>COVID-19</i> tidak akan hilang. • Tentu akan menjadi pertanyaan masyarakat dan banyak pihak nantinya, mengapa ketika semua sudah berjalan lagi dengan <i>new normal</i>, Pilkadaanya belum

		diteruskan, nanti bisa muncul pandangan yang justru sebaliknya.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Pernyataan terkait dana Pilkada 2020 jika ditunda akan jadi terbuang sia-sia karena anggaran yang telah dicairkan setidaknya mencapai Rp 4,1 Triliun.
Skrip	What	Alasan penting KPU tetap gelar Pilkada saat pandemi.
	Where	Jakarta.
	When	21 Juni 2020
	Who	I Dewa Kade Warsa Raka Sandi, Viryan Aziz
	Why	Karena pandemi <i>COVID-19</i> tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf dan hubungan antar kalimat pada artikel berita ini dimulai dengan pernyataan Komisioner KPU yang menjelaskan urgensi pelaksanaan Pilkada 2020 yang kemudian didukung dengan kutipan langsung dari anggota KPU yang menyatakan bahwa pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto warga yang menggunakan masker melintas melewati mural yang bergambar logo KPU.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel ini adalah “Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi”. *Lead* dalam artikel ini dibuat selaras dengan judul agar khalayak dapat langsung memahami isi artikel dengan mudah. Dalam artikel ini, Kompas hanya menggunakan dua sumber kutipan, yaitu dari Komisioner

KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Anggota KPU Viryan Aziz. Dalam kutipannya saat diwawancarai, Dewa mengatakan,

“Setidaknya ada empat alasan urgensi menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Pertama, KPU tentu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku. Kedua, tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan pandemi akan berakhir. Ketiga, mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih. Lalu yang Keempat yaitu soal tata kelola anggaran yang harus dipikirkan.”

Empat alasan tersebut juga dibenarkan oleh Anggota KPU yaitu Viryan Aziz. Menurut penuturan Viryan, karena Indonesia sedang melakukan adaptasi kebiasaan baru, dengan pertimbangan itu, Pilkada pun seharusnya juga sudah bisa digelar. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan lanjutan dari Viryan yang mengatakan,

“Jika Pilkada ditunda melewati tahun atau pada 2021, maka anggaran yang telah dicairkan pada 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran, sementara anggaran yang telah dicairkan sudah mencapai Rp 4,1 Triliun.”

Struktur Skrip, pada artikel ini akan dijelaskan secara detail bagaimana cara Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel ini unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Alasan pentingnya KPU tetap gelar Pilkada saat pandemi. Kemudian unsur (*Why*) Karena pandemi *COVID-19* tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Dalam artikel tersebut unsur (*Who*) juga menarik karena Kompas menggunakan dua narasumber yang memiliki latar belakang lembaga yang sama yaitu sama-sama berasal dari KPU. Selain itu, unsur lain yang hilang dalam artikel ini adalah (*How*) tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita ini.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan langsung dan tidak langsung dari dua narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Anggota KPU Viryan Aziz. Kompas memasukkan pernyataan Dewa yang menjelaskan secara detail alasan-alasan penting Pilkada tetap digelar saat pandemi. KPU juga menjelaskan telah sepakat dengan pemerintah dan DPR untuk membuat Perppu yang menjadi pondasi hukum pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. KPU pun mendapat rekomendasi untuk tetap melanjutkan Pilkada dari gugus tugas *COVID-19* dengan berdasarkan standar keamanan protokol kesehatan. Kemudian juga diperkuat dengan pernyataan dari Viryan Aziz.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan seorang warga yang menggunakan masker sedang melintas melewati mural yang bergambar logo KPU. Foto tersebut memiliki makna bahwa masyarakat saat ini sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus *COVID-19*. Karena bagaimanapun pandemi virus *COVID-19* belum akan berakhir kecuali ditemukan solusi yang tepat.

Tabel 3.13

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Pilkada di Tengah Pandemi, Apa Pentingnya bagi Rakyat?
	<i>Lead</i>	Banyak orang takut dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah Pandemi <i>COVID-19</i> , barangkali Anda termasuk salah satunya.
	Latar Informasi	Kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya Pilkada yang dilakukan di tengah pandemi <i>COVID-19</i> .
	Kutipan Sumber	Tidak ada kutipan narasumber pada berita ini.
	Pernyataan/Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Menunda Pilkada 2020 dapat memunculkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan pandemi <i>COVID-19</i>. • Bila Pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala daerah maka oposisi atau kubu yang berlawanan akan menggugat karena menganggap hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhalang. • Menunda Pemilu dengan alasan pandemi <i>COVID-19</i> justru akan berpotensi mengebiri demokrasi Indonesia. konotasinya jelas, tidak stabilnya politik di tengah pandemi menjadi taruhan, bahkan akan

		<p>meningkatkan ketidakpercayaan pada pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika warga daerah ditanya, kira-kira lebih rela dipimpin gubernur, walikota, atau bupati beneran atau pejabat pelaksana gubernur, walikota atau bupati. Pasti, lebih banyak yang ingin dipimpin sosok gubernur, walikota, atau bupati pelaksana.
	Penutup	Pilkada yang demokratis, sehat dan aman mesti diwujudkan bersama-sama. Kesetaraan kompetisi diantara masing-masing kandidat, pemenuhan hak pilih dan penerapan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga. Jangan sampai, setelah Pilkada malah menimbulkan kelompok kasus baru karena mengabaikan protokol kesehatan.
Skrip	What	Pentingnya Pilkada bagi rakyat
	Where	Tidak ada di dalam artikel ini.
	When	7 Juli 2020
	Who	Dody Wijaya
	Why	Karena menunda Pilkada bisa menimbulkan konflik politik dan berpotensi mengebiri demokrasi.
	How	Tidak ada.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Hubungan antar kalimat pada artikel berita ditulis berdasarkan pernyataan dan argumen pribadi penulis artikel yang kemudian didukung dengan data-data untuk mendukung akurasi argumen.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengebiri • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto tangan yang sedang memegang surat suara.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Pilkada di Tengah Pandemi, Apa Pentingnya bagi Rakyat?”. *Lead* dalam artikel tersebut dibuat langsung menuju ke inti permasalahan, yakni kekhawatiran masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi *COVID-19*. Dalam artikel tersebut, Kompas mengajak khalayak untuk menelaah lebih jauh tentang alasan mengapa Pilkada digelar di tengah pandemi. Tidak ada kutipan narasumber dalam artikel tersebut. Seluruh isi artikel ditulis berdasarkan pernyataan dan opini dari penulis artikel yaitu Dody Wijaya. Dalam opininya Dody mengatakan,

“Menunda Pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan COVID-19. penundaan Pilkada dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi.”

Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan, Pilkada yang demokratis, sehat dan aman mesti diwujudkan bersama-sama. Kesetaraan kompetisi diantara masing-masing kandidat, pemenuhan hak pilih dan penerapan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga. Jangan sampai, setelah Pilkada malah menimbulkan kelompok kasus baru karena mengabaikan protokol kesehatan.

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Pentingnya Pilkada bagi rakyat. Kemudian unsur (*Why*) Karena menunda Pilkada bisa menimbulkan konflik politik dan berpotensi mengebiri demokrasi. Dalam artikel tersebut unsur (*Who*) juga menarik karena Kompas tidak menggunakan kutipan narasumber melainkan pernyataan dan opini penulis artikel sendiri. Selain itu, unsur lain yang hilang dalam artikel ini ada dua unsur yaitu (*Where*) tidak dijelaskan dimana artikel tersebut ditulis, dan (*How*) tidak dijelaskan terkait kronologi dalam artikel berita tersebut.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut ditulis berdasarkan pernyataan dan argumen pribadi penulis artikel. Kemudian ditambahkan dengan data-data untuk mendukung akurasi argumen. Tidak ada satupun narasumber dalam artikel tersebut.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan kata kiasan seperti “Mengebiri”. Kata “mengebiri” terdapat pada kutipan opini yang mengatakan “penundaan Pilkada dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi”. Mengebiri sendiri memiliki arti menghilangkan fungsi alat reproduksi pada hewan atau manusia. Sehingga kata “mengebiri demokrasi” dalam artikel tersebut dapat diartikan

sebagai penghapusan fungsi utama pada demokrasi. Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan tangan yang sedang menggenggam sebuah surat suara. Foto ilustrasi tersebut tidak memiliki makna khusus dan hanya menekankan isu Pilkada di tengah pandemi *COVID-19* dan mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.14

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Pilkada Berlanjut, Ketua KPU: Tak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Berakhir
	<i>Lead</i>	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tahapan Pilkada 2020 akan tetap berjalan meski kasus <i>COVID-19</i> di Indonesia terus meningkat.
	Latar Informasi	Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah akan berakhir.
	Kutipan Sumber	Ketua KPU, Arief Budiman <ul style="list-style-type: none"> • Kalau toh ditunda, kita tidak ada yang bisa memprediksi tahun depan pandeminya hilang atau tidak, kita tidak bisa memperkirakan. • Pilkada itu regulasinya sudah mengatur bagaimana merespon, bagaimana menyikapi situasi seperti ini, dan lain-lain. • Mudah-mudahan ya sangat berharap kurvanya melandai.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan pernyataan informasi yang berisi tentang wacana Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada yang tadinya akan digelar pada 23 September namun, akibat wabah <i>COVID-19</i> diundur menjadi 9 Desember 2020.

Skrip	What	Pilkada terus berlanjut meski kasus <i>COVID-19</i> meningkat.
	Where	Jakarta.
	When	29 Juli 2020
	Who	Arief Budiman
	Why	Tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir.
	How	KPU telah mengeluarkan aturan tentang penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam <i>COVID-19</i> .
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf-paragraf pada artikel ini diisi dengan kutipan dari Ketua KPU yang menekankan bahwa Pilkada akan terus berlanjut meski kasus <i>COVID-19</i> terus meningkat. Kemudian ditambahkan pernyataan bahwa tidak ada yang tau kapan pandemi berakhir. Lalu, dihubungkan dengan kalimat yang menyatakan penerbitan regulasi yang mengatur tentang Pilkada dalam kondisi pandemi <i>COVID-19</i> dan ditutup dengan harapan kasus <i>COVID-19</i> menurun.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Ketua KPU, Arief Budiman yang sedang duduk dalam diskusi bersama.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Pilkada Berlanjut, Ketua KPU: Tak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Berakhir”. *Lead* dalam artikel tersebut dibuat selaras dan berkesinambungan dengan judul agar memudahkan khalayak untuk dapat memahami isi artikel. Dalam artikel tersebut, Kompas memberikan kesan kepada khalayak bahwa Pilkada 2020 mau tidak mau harus tetap berlanjut, karena menurut Arief Budiman selaku Ketua KPU, tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi *COVID-19* berakhir. Dalam kutipannya, Arief mengatakan,

“Kalau toh ditunda, kita tidak ada yang bisa memprediksi tahun depan pandeminya hilang atau tidak, kita tidak bisa memperkirakan.”

Untuk itu Pilkada tetap dilanjutkan dengan harapan kurva kasus positif akan melandai seiring berjalannya waktu. Artikel tersebut hanya menggunakan satu kutipan narasumber. Seluruh isi artikel ditulis berdasarkan pernyataan dari narasumber yaitu dari Ketua KPU, Arief Budiman. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan, yang menginformasikan tentang wacana Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada yang tadinya akan digelar pada 23 September namun, akibat pandemi *COVID-19* diundur menjadi 9 Desember 2020.

Struktur Skrip, pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel tersebut unsur yang sangat ditonjolkan adalah unsur (*What*) Pilkada terus berlanjut walaupun kasus *COVID-19* meningkat. Lalu unsur (*Why*) Karena tak ada yang dapat memberikan prediksi kapan pandemi virus *COVID-19* berakhir. Pada artikel tersebut juga ada unsur (*How*) KPU telah mengeluarkan aturan tentang penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam *COVID-19*. Unsur ini menjelaskan bagaimana sikap dan respon pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi *COVID-19*.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut hanya menggunakan pernyataan langsung dan tidak langsung dari satu narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Ketua KPU, Arief Budiman. Kompas menggunakan pernyataan Arief yang menjelaskan Pilkada harus dilanjutkan dan tidak bisa ditunda, karena pandemi *COVID-19* tidak bisa dipastikan kapan berakhir. Selain itu dijelaskan juga bahwa KPU telah menerbitkan regulasi yang dapat mengatur soal penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi pandemi *COVID-19*.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan Ketua KPU, Arief Budiman yang sedang duduk dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi, foto diambil pada 6 Juli 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.15

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 5 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi
	<i>Lead</i>	Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi tetap akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan <i>COVID-19</i> secara ketat.
	Latar Informasi	Pilkada 2020 tidak akan ditunda dan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.
	Kutipan Sumber	<p>Wakil Ketua DPR, Sufni Dasco Ahmad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di beberapa negara kan juga ada yang cukup sukses melakukan pilkada di tengah pandemi ini. • Karena itu sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada kami akan menyesuaikan implementasi di lapangan. • Dan juga termasuk penyelenggara pemilu dari semua lini harus lebih ketat melakukan pengawasan atau pelaksanaannya terkait protokol <i>COVID-19</i> yang sudah direvisi. • Apabila ini setelah dijalani masih juga belum bisa menghasilkan signifikan, nanti mari kita lihat hasil kajiannya lebih jauh. <p>Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020

		<p>Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penundaan tidak mungkin dilakukan karena tak ada satu institusi pun yang bisa memastikan akhir dari pandemi <i>COVID-19</i>.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan pernyataan anggaran Pilkada 2020 sudah hampir seluruhnya dicairkan. Dengan total anggaran Rp 19 triliun, hal itu diharapkan dapat menstimulasi ekonomi.
Skrip	What	Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan.
	Where	Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
	When	22 September 2020
	Who	Sufni Dasco Ahmad, Ahmad Doli Kurnia, Tito Karnavian
	Why	Beberapa negara lain sukses menggelar Pemilu di tengah pandemi <i>COVID-19</i>
	How	Sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan <i>COVID-19</i> juga harus ditetapkan dalam PKPU. Dengan begitu, penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Paragraf dimulai dengan kutipan Wakil Ketua DPR yang didukung oleh pernyataan Ketua Komisi II yang mengungkapkan Pilkada akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Hal tersebut sudah melalui kesepakatan bersama dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Kemudian pernyataan tersebut didukung juga oleh pernyataan Mendagri yang mengatakan penundaan Pilkada tidak mungkin dilakukan karena tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Dan ditutup

		dengan harapan bahwa Pilkada mampu menstimulasi ekonomi.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Wakil Ketua DPR, Sufni Dasco Ahmad yang tengah diwawancarai.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi”. *Lead* dalam artikel tersebut tidak berkesinambungan dengan judul artikel namun, sebagai pengantar sebelum menuju isi berita. Dalam artikel tersebut, Kompas memberikan kesan kepada khalayak bahwa Pilkada tetap akan dilaksanakan dengan protokol pencegahan *COVID-19* secara ketat. Artikel tersebut menggunakan tiga kutipan narasumber yaitu dari Ketua Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam kutipannya, ketiga narasumber sepakat bahwa Pilkada tetap akan diselenggarakan dengan protokol pencegahan *COVID-19* secara ketat. Sufni mengatakan

“Di beberapa negara sudah ada yang cukup sukses melakukan Pilkada di tengah pandemi, sehingga tidak menutup kemungkinan Pilkada di Indonesia juga bisa sukses.”

Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyebutkan penyelenggaraan Pilkada dikarenakan anggaran Pilkada 2020 sudah hampir semuanya dicairkan. Dengan total anggaran mencapai Rp 19 triliun, Mendagri berharap hal tersebut mampu menstimulasi perekonomian Indonesia.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP menyepakati bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan. Kemudian unsur (*Why*) Karena beberapa negara lain sudah ada yang sukses menggelar Pemilu di tengah pandemi *COVID-19*. Pada artikel berita tersebut juga terdapat unsur (*How*) Permintaan pengaturan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan *COVID-19* juga harus ditetapkan dalam PKPU. Dengan begitu, penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan langsung dan tidak langsung dari tiga narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Ketua Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kompas memasukkan pernyataan dari ketiga narasumber tersebut yang menjelaskan Pilkada akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Hal tersebut sudah melalui kesepakatan bersama. Mendagri juga menambahkan penundaan Pilkada tidak mungkin dilakukan karena tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Selain itu Pilkada diharapkan mampu menstimulasi ekonomi.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan Wakil Ketua DPR, Sufni Dasco Ahmad yang tengah diwawancarai ketika di Senayan, Jakarta pada 10 Maret 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.16

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 6 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19
	<i>Lead</i>	Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang di tengah pandemi COVID-19.
	Latar Informasi	Pro dan Kontra Pilkada 2020
	Kutipan Sumber	<p>Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya pandemi <i>COVID-19</i>, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. <p>Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika diperlukan, (presiden) dapat mengambil alih dan memimpin

langsung (penanganan pandemi COVID-19) agar lebih efektif, terarah dan maksimal.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

- Kita bisa menyelenggarakannya pada Juni 2021. Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik, tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Bukan memudaratkan rakyat.
- Toh, bisa mengangkat pelaksana tugas, dan selama ini mekanisme tersebut selalu berjalan baik.
- Untuk melaksanakan itu, Pasal 122A Perppu tersebut mengatakan, atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR, Pemilihan kepala daerah tersebut bisa dilakukan. Tidak perlu lagi merevisi undang-undang.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana

- Kalau PLT itu terbatas, tidak bisa melakukan putusan-putusan yang strategis. Yang kedua waktunya juga terbatas, PLT itu tidak bisa 5 tahun, seterusnya menjabat, waktunya dibatasi.
- Jika ada satu pimpinan dinas, misalnya kepala dinas kesehatan, bekerja tidak maksimal dan harus diganti, pejabat Plh atau Plt tidak memiliki kewenangan untuk ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

- Kalau *setting*-nya tepat, ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan (penyebaran) COVID-19 ini. Di negara kita yang menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi, kendali sosial kontrol akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian, karena sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga

		<p>terbagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudian penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93
	Pernyataan/Opini	Penilaian dari pihak lain yang menganggap Pilkada akan membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih luas di tengah masyarakat. Maka dari itu perlu penundaan sampai pandemi mereda dan memungkinkan diselenggarakannya Pilkada. Namun di satu sisi, Pilkada mesti dilaksanakan agar bisa menciptakan pemimpin daerah yang mampu menangani pandemi dengan maksimal.
	Penutup	Tito Karnavian menegaskan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, lalu tentang Wabah Penyakit Menular, dan tentang Kejarantinaan Kesehatan.
Skrip	What	Penyelenggaraan Pilkada serentak menimbulkan Pro dan Kontra dari berbagai pihak.
	Where	Tidak ada dalam artikel ini.
	When	24 September 2020
	Who	Said Aqil Siroj, Abdul Mu'ti, Jusuf Kalla, Aditya Perdana, Tito Karnavian

	Why	Karena Pilkada diselenggarakan di tengah Pandemi <i>COVID-19</i> .
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Hubungan kalimat dalam artikel dimulai dengan pandangan dari kedua sisi terhadap diselenggarakannya Pilkada. Kemudian dilanjutkan dengan argumen dari beberapa narasumber yang menolak Pilkada diselenggarakan. Lalu dilanjutkan dengan argumen tandingan dari beberapa narasumber yang mendukung Pilkada tetap diselenggarakan di tengah pandemi.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Petugas Kesehatan yang sedang menyemprotkan cairan disinfektan lengkap dengan Alat Pelindung Diri (APD) di TPS saat Simulasi Pilkada.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi *COVID-19*”. *Lead* dalam artikel tersebut dibuat selaras dan berkesinambungan dengan judul artikel. Artikel tersebut menggunakan lima kutipan narasumber yaitu dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam kutipannya, narasumber dipisahkan menjadi dua pihak, yang menolak penyelenggaraan Pilkada, dan yang mendukung penyelenggaraan Pilkada. Dari pihak yang menolak penyelenggaraan Pilkada ada tokoh seperti Said Aqil Siroj, Abdul Mu'ti, dan Jusuf Kalla. Ketiga narasumber tersebut sepakat bahwa Pilkada akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Penundaan menjadi jalan keluar yang dianjurkan oleh ketiga narasumber tersebut, dan mengimbau pemerintah agar lebih fokus terhadap penanganan *COVID-19*. Dari pihak yang mendukung ada tokoh seperti Aditya Perdana, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Aditya mengatakan bahwa,

“Pandemi COVID-19 belum pasti kapan akan bertakhir sehingga ketidakpastian didalam politik ini bisa berdampak terhadap banyak hal.”

Melihat pernyataan dari para narasumber, Kompas memiliki opini yang menyatakan sejumlah pihak mengklaim Pilkada serentak membuka kemungkinan masyarakat tertular virus. Oleh karena itu, perlu untuk menunda sampai situasi pandemi *COVID-19* mereda sehingga bisa mengadakan Pilkada. Namun di satu sisi, Pilkada mesti dilaksanakan agar bisa menciptakan pemimpin daerah yang mampu menangani pandemi dengan maksimal. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian, yang menyebutkan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Penyelenggaraan Pilkada serentak menimbulkan Pro dan Kontra dari berbagai pihak. Kemudian unsur (*Why*) Karena Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi *COVID-19*. Unsur (*Who*) dalam artikel tersebut cukup menarik, karena menggunakan lima narasumber yang terpisah menjadi dua belah pihak. Hal tersebut membantu Kompas dalam melihat permasalahan secara keseluruhan dan bisa menulis opini berdasarkan kutipan-kutipan narasumber tersebut.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari tiga narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kompas menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Kompas memasukkan pernyataan dari kelima narasumber tersebut dan menjelaskan pandangan dari kedua sisi terhadap diselenggarakannya Pilkada. Kemudian dilanjutkan dengan argumen dari beberapa narasumber yang menolak Pilkada diselenggarakan. Lalu dilanjutkan dengan argumen tandingan dari beberapa narasumber yang mendukung Pilkada tetap diselenggarakan di tengah pandemi.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan Petugas Kesehatan yang sedang menyemprotkan cairan disinfektan lengkap dengan Alat Pelindung Diri (APD) di TPS saat Simulasi Pilkada. Foto tersebut memiliki makna yang berarti pelaksanaan Pilkada benar-benar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tabel 3.17

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 7 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19
	<i>Lead</i>	Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Saydiman Marto mengungkapkan lima urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19.
	Latar Informasi	Urgensi pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi.
	Kutipan Sumber	Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Saydiman Marto <ul style="list-style-type: none"> Keputusan politik bersama memilih opsi optimis antara KPU, pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan KPU.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan pernyataan informasi Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Skrip	What	Urgensi pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19
	Where	Jakarta, Webinar
	When	30 September 2020

	Who	Saydiman Marto
	Why	Karena pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sepakat bahwa Pilkada 2020 akan tetap diselenggarakan.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Hubungan kalimat dalam artikel dimulai dengan Saydiman Marto yang memaparkan poin-poin urgensi dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Kemudian dilanjutkan dengan fakta dan informasi bahwa Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto tangan yang memegang sebuah surat suara.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi *COVID-19*”. *Lead* dalam artikel tersebut dibuat selaras dan berkesinambungan dengan judul artikel. Artikel tersebut hanya menggunakan satu kutipan narasumber yaitu dari Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Saydiman Marto. Dalam artikel tersebut, dijelaskan tentang lima alasan penting tentang penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, yang pertama, penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan keputusan bersama antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu. Kedua, bentuk kematangan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Ketiga meminimalisir terbatasnya wewenang dari kepemimpinan pejabat pelaksana tugas (plt). Keempat, terpilihnya kepala daerah yang bisa dipercaya publik mampu mengatasi pandemi virus *COVID-19* di wilayahnya. Kelima, untuk menggerakkan perekonomian negara di tengah krisis pandemi *COVID-19*. Artikel ditutup dengan informasi hari pemungutan suara Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. Wilayah penyelenggaraan Pilkada 2020 di 270 wilayah, termasuk 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Struktur Skrip, struktur skrip pada artikel ini dijelaskan secara detail bagaimana cara Kompas.com menyampaikan informasi. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Urgensi pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi *COVID-19*. Kemudian unsur (*Why*) Karena penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah menjadi kesepakatan bersama. Unsur yang hilang dalam artikel tersebut adalah unsur (*How*).

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari tiga narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Saydiman Marto. Kompas menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Kompas memasukkan pernyataan dari Saydiman yang menjelaskan poin-poin urgensi dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Kemudian dilanjutkan dengan fakta dan informasi bahwa Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan tangan yang memegang sebuah surat suara. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.18

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 8 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi <i>COVID-19</i>
	<i>Lead</i>	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan beberapa strategi yang akan dilakukan lembaganya jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
	Latar Informasi	Strategi jelang Pilkada 2020

	Kutipan Sumber	Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi <ul style="list-style-type: none"> • (Selanjutnya) memperbanyak simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai protokol kesehatan di tempat pemungutan suara. • Para penegak hukum sudah jauh lebih intens di dalam menegakkan aturan protokol kesehatan dan memberikan sanksi peserta yang melanggar.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan pernyataan informasi Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Skrip	What	Strategi menjelang Pilkada 2020
	Where	Jakarta, Webinar
	When	9 November 2020
	Who	Pramono Ubaid Tanthowi
	Why	Karena Pilkada 2020 diselenggarakan tepat sebulan lagi.
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Hubungan kalimat dalam artikel dimulai dengan Pramono Ubaid Tanthowi yang menjelaskan strategi-strategi yang ia siapkan menjelang diselenggarakannya Pilkada 2020 bulan depan. Kemudian dilanjutkan dengan fakta dan informasi bahwa Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi yang sedang diwawancarai.
---------	----------------------------------	--

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19”. *Lead* dalam artikel tersebut dibuat selaras dan berkesinambungan dengan judul artikel. Pada bagian *Lead*, Kompas menuliskan tentang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi membocorkan beberapa strategi yang akan dilakukan KPU menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Strategi tersebut antara lain, melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pelatihan materi protokol kesehatan untuk petugas KPPS, memberikan sanksi tegas bagi pasangan calon peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan, kemudian, berkolaborasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan juga Dinas Kesehatan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat. Artikel tersebut hanya menggunakan satu kutipan narasumber yaitu dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi. Dalam artikel tersebut, Pramono juga menyebutkan bahwa para penegak hukum sudah jauh lebih intens di dalam menegakkan aturan protokol kesehatan dan memberikan sanksi peserta yang melanggar. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan yang menginformasikan hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Struktur Skrip, struktur skrip dalam artikel tersebut menggambarkan bagaimana Kompas.com mengisahkan atau menyajikan suatu berita. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Strategi menjelang Pilkada 2020. Unsur ini menjelaskan secara detail bagaimana KPU menyusun strategi agar Pilkada 2020 berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian unsur (*Why*) Karena Pilkada 2020 diselenggarakan tepat sebulan lagi. Unsur yang hilang dalam artikel tersebut adalah unsur (*How*).

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari tiga narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi. Kompas menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Kompas memasukkan pernyataan dari Pramono Ubaid Tanthowi yang menjelaskan strategi-strategi yang ia siapkan menjelang

diselenggarakannya Pilkada 2020 bulan depan. Kemudian dilanjutkan dengan fakta dan informasi bahwa Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi yang sedang diwawancarai di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.19

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 9 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi
	<i>Lead</i>	Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kastorius Sinaga mengatakan, pemerintah mengharapkan tingkat partisipasi di Pilkada 2020 tetap tinggi meski digelar di tengah pandemi.
	Latar Informasi	Pemerintah khawatir partisipasi masyarakat menurun.
	Kutipan Sumber	Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga <ul style="list-style-type: none"> • Yang memang selalu kita dorong adalah partisipasi masyarakat yang tinggi sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya. • Jika masyarakat merasa aman dari potensi penularan atau terhindar dari risiko menjadi pembawa virus, tentu partisipasi bisa terpenuhi • Di hari H pemungutan suara mari kita ajak semua pemilih untuk mempraktikkan seluruh protokol kesehatan sehingga pilkada aman dari COVID-19.

	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan pernyataan dari Kastorius Sinaga yang mengajak semua pemilih untuk mempraktikkan seluruh protokol kesehatan pada saat hari pemilihan, kemudian dilanjutkan dengan informasi Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Skrip	What	Pemerintah khawatir partisipasi publik rendah.
	Where	Jakarta.
	When	5 Desember 2020
	Who	Kastorius Sinaga.
	Why	Karena Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi virus <i>COVID-19</i>
	How	Tidak ada dalam artikel ini.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Hubungan kalimat dalam artikel dimulai dengan Kastorius Sinaga yang menyampaikan data partisipasi publik dari tiga Pilkada sebelumnya yang mencapai rata-rata 75 persen. Kastorius juga menyampaikan bagaimana Pilkada tahun ini menjadi tantangan dan meminta KPU, Bawaslu dan pemilih untuk bekerja sama menjamin kegiatan berjalan sesuai protokol kesehatan agar Pilkada 2020 aman dari Covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan fakta dan informasi bahwa Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah foto Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang sedang memberikan sambutan.
---------	----------------------------------	---

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi”. *Lead* dalam artikel tersebut dibuat selaras dan berkesinambungan dengan judul artikel. Pada bagian *Lead*, Kompas menuliskan tentang Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga yang mengharapkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 tetap tinggi walaupun diselenggarakan di tengah pandemi *COVID-19*. Kastorius berharap demikian karena dalam Pilkada-pilkada sebelumnya partisipasi masyarakat rata-rata sebesar 75 persen. Dalam artikel tersebut, Kastorius mengajak kepada seluruh pemilih agar senantiasa mempraktikkan seluruh protokol kesehatan di hari pemungutan suara, sehingga penyelenggaraan Pilkada terhindar dari ancaman virus *COVID-19*. Pernyataan Kastorius tersebut menjadi penutup dari artikel yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang menginformasikan hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Struktur Skrip, struktur skrip dalam artikel tersebut menggambarkan bagaimana Kompas.com mengisahkan atau menyajikan suatu berita. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Pemerintah khawatir partisipasi publik rendah. Kemudian unsur (*Why*) Karena Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi virus *COVID-19*. Unsur yang hilang dalam artikel tersebut adalah unsur (*How*).

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari tiga narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan yakni dari Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga. Kompas menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Kompas memasukkan pernyataan dari Kastorius Sinaga yang menyampaikan data partisipasi publik dari tiga Pilkada sebelumnya yang mencapai rata-rata 75 persen. Kastorius juga menyampaikan bagaimana Pilkada tahun ini menjadi tantangan dan meminta KPU, Bawaslu dan pemilih untuk bekerja sama menjamin kegiatan berjalan sesuai protokol kesehatan agar Pilkada 2020 aman dari *COVID-19*. Kemudian dilanjutkan dengan fakta dan informasi bahwa

Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan foto yang menampilkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang sedang menyampaikan sambutan dalam peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, pada 7 Agustus 2020. Foto tersebut tidak bermakna apapun dan hanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung isi artikel berita.

Tabel 3.20

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 10 Pemberitaan Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline/Judul</i>	Pilkada 2020: Digelar di Tengah Pandemi, Ditentang hingga Sederet Aturan Baru
	<i>Lead</i>	Hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akhirnya tiba. Pada Rabu (9/12/2020) hari ini, 270 daerah di Indonesia menggelar pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.
	Latar Informasi	Hari penyelenggaraan Pilkada 2020.
	Kutipan Sumber	<p>Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri dan satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses Pilkada karena ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi, agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID-19 dan ekonomi. <p>Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

		<p>menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.</p> <p>Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan-gangguan, konflik, dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan <i>COVID-19</i> jangan sampai terjadi, khususnya di Sulut. <p>Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya ada 15 hal baru terkait hari pencoblosan Pilkada 2020 yang akan diterapkan di tempat pemungutan suara (TPS) <p>Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan semua individu yang bertugas memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Petugas juga wajib mengingatkan pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang sama. <p>Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segera pulang ke rumah setelah mencoblos. Bersihkan diri sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. • Jaga stamina tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Datang ke TPS sesuai jadwal.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini penulis pada berita.
	Penutup	Artikel ditutup dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang menghimbau masyarakat agar memastikan kondisi tubuhnya sehat dan bugar saat Pilkada.

Skrip	What	Rangkuman perjalanan agenda Pilkada 2020
	Where	Jakarta.
	When	9 Desember 2020
	Who	Presiden RI Joko Widodo, Said Aqil Siradj, Tito Karnavian, Pramono Ubaid Tanthowi, Wiku Adisasmito, Terawan Agus Putranto.
	Why	Karena Pilkada 2020 telah berhasil diselenggarakan.
	How	Melalui banyak pertentangan hingga menciptakan sederet aturan baru.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat	Hubungan kalimat dalam artikel dimulai dengan Kutipan Pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kemudian didukung dengan beberapa kutipan pernyataan dari Said Aqil Siradj, Tito Karnavian, Pramono Ubaid Tanthowi, Wiku Adisasmito, hingga Terawan Agus Putranto. Kutipan-kutipan pernyataan tersebut didapatkan dari dokumen artikel-artikel sebelumnya atau dari siaran pers beberapa hari sebelumnya. Kemudian ditambahkan perjalanan singkat bagaimana Pilkada 2020 ditentang hingga akhirnya berhasil dilaksanakan.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi yang digunakan dalam artikel ini adalah gambar ilustrasi sebuah kotak suara yang di bagian sisinya terdapat gambar uang pecahan seratur ribu rupiah dan logo dari KPU.

Struktur Sintaksis, Judul berita pada artikel tersebut adalah “Pilkada 2020: Digelar di Tengah Pandemi, Ditentang hingga Sederet Aturan Baru”. Pada bagian *Lead*, Kompas menuliskan tentang hari pemungutan suara Pilkada 2020 yang akhirnya telah tiba dan diikuti oleh 270 daerah di Indonesia untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Dalam artikel

tersebut, Kompas menggunakan enam kutipan narasumber, yaitu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, Juru Bicara Satgas Penanganan *COVID-19* Wiku Adisasmito, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Artikel tersebut merupakan rangkuman dari serangkaian polemik pro dan kontra Pilkada selama tahun 2020. Dalam artikel tersebut, Kompas menuliskan pernyataan dari Said Aqil Siradj sebagai salah satu pihak yang menolak Pilkada diselenggarakan di tengah pandemi. Pada pernyataan Aqil disebutkan ia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda Pilkada. Namun pada akhirnya Pilkada 2020 tetap diselenggarakan dan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Pernyataan lain yang dikutip oleh Kompas merupakan pernyataan dari Pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terus mengingatkan masyarakat agar Pilkada harus dilakukan mengikuti protokol kesehatan. Artikel tersebut ditutup dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang menghimbau masyarakat agar memastikan kondisi tubuhnya sehat dan bugar saat Pilkada.

Struktur Skrip, struktur skrip dalam artikel tersebut menggambarkan bagaimana Kompas.com mengisahkan atau menyajikan suatu berita. Dalam artikel tersebut unsur yang paling ditonjolkan adalah unsur (*What*) Rangkuman serangkaian perjalanan agenda Pilkada di tahun 2020. Kemudian unsur (*Why*) Karena Pilkada 2020 telah berhasil diselenggarakan. Unsur (*Who*) disini juga cukup menarik karena dari keenam narasumber yang dicantumkan, Kompas hanya mengambil satu narasumber yang sebelumnya menolak Pilkada diselenggarakan. Kompas sepertinya ingin menunjukkan bahwa Pilkada 2020 tetap sukses meskipun beberapa pihak menolaknya. Kompas menilai pemerintah berhasil menyelenggarakan Pilkada 2020 meskipun juga dijelaskan dalam Unsur (*How*) Melalui banyak pertentangan hingga menciptakan sederet aturan baru.

Struktur Tematik, Berita pada artikel tersebut menggunakan pernyataan dari enam narasumber dalam penulisan artikel secara keseluruhan. Kompas menggunakan kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung pada artikel tersebut. Kompas memasukkan pernyataan dari keenam narasumber yang dinilai dari kutipan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kemudian dilanjutkan dengan beberapa kutipan pernyataan dari Said Aqil Siradj, Tito Karnavian, Pramono Ubaid Tanthowi, Wiku Adisasmito, hingga Terawan Agus Putranto. Kutipan-kutipan pernyataan tersebut didapatkan dari dokumen artikel-artikel sebelumnya atau dari siaran pers beberapa hari

sebelumnya. Kemudian ditambahkan juga serangkaian perjalanan singkat bagaimana Pilkada 2020 yang semula ditentang hingga akhirnya berhasil dilaksanakan.

Struktur Retoris, Dalam artikel tersebut, Kompas menggunakan gambar yang menampilkan sebuah kotak suara yang di bagian sisinya terdapat gambar uang pecahan seratus ribu rupiah dan logo dari KPU. Foto tersebut memiliki arti bahwa penyelenggaraan Pilkada memakan banyak anggaran sehingga banyak pihak yang menaruh perhatian lebih terhadap agenda demokrasi tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan

Dari keseluruhan hasil analisis framing terhadap berita penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi *COVID-19*, penulis menemukan bahwa artikel yang dimuat dalam media online Tempo.co dan Kompas.com banyak memperlihatkan kesamaan dalam gaya penulisan berita namun memiliki perbedaan dalam menampilkan sudut pandang. Pada struktur yang telah dianalisis kedua media online tersebut tidak banyak memiliki perbedaan dalam penulisan beritanya. Dua media online tersebut terlihat berbeda karena Tempo.co lebih intens dalam memberitakan penolakan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, sedangkan Kompas.com lebih banyak menyoroti persiapan yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara menjelang Pilkada 2020.

Dilihat dari struktur sintaksis, kedua media online pada edisi Juni-Desember 2020 mengangkat berita tentang polemik penyelenggaraan Pilkada di tengah masa pandemi *COVID-19*. Dalam penulisan judul *headline* dari Tempo.co sering menggunakan ungkapan yang menyudutkan pemerintah, contohnya pada judul artikel “Minta Pilkada 2020 Ditunda, Kemitraan: Pemerintah dan KPU Menutup Mata” dari judul tersebut Tempo.co terlihat berusaha mempengaruhi pola pikir pembaca untuk melihat situasi masalah dengan menggunakan ungkapan dari narasumber. Pemerintah dinilai sengaja tidak mau tahu dengan kondisi Indonesia yang sedang berusaha bertahan hidup di masa pandemi *COVID-19*, dengan tetap menyelenggarakan Pilkada yang berpotensi memperparah penyebaran virus.

Selain itu dalam artikel “KPK Ingatkan Bahaya Pilkada 2020 di Tengah Pandemi *COVID-19*” Tempo.co juga terang-terangan membahas ketidaksiapan pemerintah dari segi regulasi dan institusi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pada artikel tersebut dijelaskan juga bahwa regulasi yang mengatur jalannya Pilkada 2020 di tengah pandemi virus *COVID-19* belum disiapkan dengan matang oleh Pemerintah dan Penyelenggara pemilu. Hal serupa juga disampaikan oleh Komnas HAM dan wakil dari aliansi masyarakat yaitu Kemitraan. Ini menandakan Pemerintah belum sepenuhnya siap dalam membuat aturan bagaimana Pilkada akan dilaksanakan pada kondisi pandemi. Terkhusus pada tahapan kampanye karena sangat erat kaitanya dengan kerumunan massa, maka pemerintah dan penyelenggara pemilu dituntut untuk segera membuat regulasi yang sesuai agar tahapan kampanye Pilkada nantinya tidak menciptakan *cluster* baru penyebaran virus *COVID-19*.

Lain halnya dengan Kompas.com yang lebih banyak membahas persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah menjelang penyelenggaraan Pilkada, contohnya pada judul artikel “Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi *COVID-19*”. Pada judul tersebut Kompas.com mengulas strategi yang telah disusun KPU agar Pilkada berlangsung dengan aman dan lancar. Kompas.com mengajak pembaca artikel agar tidak perlu terlalu khawatir, karena pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyiapkan strategi khusus yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia selama Pilkada berlangsung. Hal tersebut juga serupa dengan jurnal yang ditulis oleh Nurhayati dan Yoedtadi (2020) yang menjelaskan bahwa, Berita-berita Kompas.com pada 2020 lebih banyak menyorot sudut pandang Pemerintah yang terus-terusan memberikan himbauan kepada publik untuk selalu waspada terhadap virus *COVID-19*.

Kompas.com juga banyak membahas bagaimana pemerintah yang tidak memiliki pilihan lain selain menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi. Hal tersebut beberapa kali disinggung dalam artikel yang dimuat Kompas.com, contohnya pada artikel “Pilkada Berlanjut, Ketua KPU: Tak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Berakhir” dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Pemerintah tidak punya opsi lain selain tetap menyelenggarakan Pilkada meskipun virus *COVID-19* masih mengancam, karena tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi *COVID-19* ini berakhir. Selain Ketua KPU, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyampaikan pendapat yang serupa di artikel berbeda. Artinya, pemerintah dan penyelenggara pemilu memang telah sepakat bahwa Pilkada 2020 tidak bisa dibatalkan atau ditunda lebih lama lagi karena efek pandemi yang tidak dapat diprediksi.

Dilihat dari struktur skrip, kedua media online tersebut memiliki kesamaan dalam mengisahkan fakta pada artikel berita. Kesamaan tersebut berupa ketidaklengkapan unsur-unsur yang terkandung dalam struktur skrip. Tempo.co dan Kompas.com terlihat jarang memasukkan unsur *How* dalam artikelnya. Dalam laporan utamanya, Tempo.co berupaya untuk mengkonstruksi dengan cara menggiring opini dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penolakan penyelenggaraan Pilkada. Pada beberapa artikel, Tempo.co cenderung hanya menggunakan satu narasumber sebagai bahan kutipan yang diantaranya berasal dari kelompok aliansi masyarakat, akademisi, dan pengamat politik diluar lingkup pemerintah atau penyelenggara pemilu. Tempo.co juga hampir tidak pernah menggunakan narasumber dari pihak pemerintah atau penyelenggara pemilu. Berbanding tebalik dengan Kompas.com yang cenderung menggunakan narasumber-narasumber dari tokoh pemerintahan ataupun tokoh penyelenggara pemilu. Walaupun pada beberapa artikel

Kompas.com juga masih hanya menggunakan satu narasumber. Meskipun begitu, Kompas.com tetap berupaya untuk mengimbangi informasi dengan menggunakan narasumber lain sebagai bahan kutipan pembandingan. Namun jika diamati secara realitas media, kedua situs tersebut cenderung menginformasikan sesuai dengan realitas sebenarnya seperti yang terjadi. Ada usaha untuk membangun konstruksi yang mendekati realitas dengan menggunakan narasumber dari pihak lain yang meskipun hanya dalam sedikit berita. Upaya ini ingin mengajak pembaca untuk bisa melihat realitas sosial dari realitas media sebagai medium pemberitaan.

Pada struktur tematik, Tempo.co lebih banyak menuliskan tema berita yang diperkuat dengan headline, lead, dan pernyataan dari narasumber. Tempo.co cenderung menggunakan kutipan narasumber sebagai pernyataan pembuka dan juga penutup. Pada bagian isi berita, kutipan langsung dari narasumber dilanjutkan dengan kutipan tidak langsung sebagai penguat isi kutipan. Prasetya, Hadi, dan Wijayanti (2020) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa, Wartawan mempunyai pandangan atau konstruksi yang berbeda-beda dalam melihat sebuah peristiwa dan hal tersebut dapat diketahui dari bagaimana peristiwa itu ditulis dalam pemberitaan. Misalnya, Tempo.co secara konsisten terus membuat artikel yang menyudutkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, dengan menuliskan bermacam-macam alasan serta resiko jika Pilkada tetap dilaksanakan. Secara tidak langsung Tempo.co menggiring pembaca agar bersikap waspada terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mempedulikan keselamatan masyarakat.

Berbeda dengan Kompas.com, beberapa artikel Kompas.com juga disertai data-data yang mendukung pernyataan dari narasumber. Terdapat hal yang menarik pada artikel Kompas.com yaitu, pada edisi Juli hingga Desember beberapa artikel memiliki paragraf penutup yang sama persis. Paragraf tersebut berisikan informasi Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada yang tadinya akan digelar pada 23 September namun, akibat wabah *COVID-19* diundur menjadi 9 Desember 2020. Paragraf penutup tersebut dapat ditemukan pada artikel edisi Juli, September, November dan Desember. Penulisan paragraf penutup yang sama dan berulang di beberapa artikel Kompas.com, dapat membuat pembaca secara tidak sadar mengingat detail waktu dan tempat Pilkada akan diselenggarakan. Kompas.com seolah berupaya membuat khalayak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada dengan terus menerus memberikan informasi detail tentang Pilkada 2020.

Dilihat dari struktur retorik, penekanan fakta pada kedua media tersebut dengan adanya penggunaan elemen dan gaya bahasa. Setiap media punya caranya sendiri dalam

menuliskan suatu berita yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memahami berita. Pada artikel Tempo.co lebih banyak menekankan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak melalui foto/gambar ilustrasi dan juga di beberapa artikel terlihat menggunakan kata ungkapan/idiom. Foto/gambar ilustrasi terletak pada bagian awal diantara judul *headline* artikel dan *lead*. Sedangkan untuk Kompas.com, menekankan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak lebih banyak hanya melalui foto/gambar ilustrasi saja. Pada beberapa artikel, kedua media tersebut memiliki kemiripan dalam menggunakan foto/gambar ilustrasi, yang mana hanya merupakan foto dari narasumber yang tercantum dalam artikel. Selain itu, foto/gambar ilustrasi yang lain hanya pelengkap untuk mendukung isi artikel, seperti contohnya, foto tangan yang sedang memegang surat suara, foto simulasi kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pandemi, atau juga foto petugas TPS yang melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan pakaian pelindung diri lengkap. Eriyanto, menjelaskan dalam bukunya tentang adanya dua efek framing, menonjolkan dan mengabaikan aspek. Biasanya pembingkaiian berita dijumpai dengan penonjolan satu aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan juga disebut sebagai fokus. Sadar atau tidak, berita lazimnya difokuskan kepada aspek tertentu. Tentu saja akan ada aspek lain yang kemudian ditinggalkan atau diabaikan. (Eriyanto, 2002, Hal. 167)

Begitu pula yang terjadi pada Tempo.co dan Kompas.com. Terlihat kedua media online tersebut memang menonjolkan aspek tertentu dalam pemberitaan Pilkada di tengah pandemi. Pada sebuah artikel yang berjudul "*Journal of Political Communication*" yang ditulis dalam Jurnal Malik, Sultan dan Kahar (2017) megatakan bahwa, penonjolan merupakan proses membentuk informasi menjadi lebih bermakna yang berkemungkinan besar untuk dapat mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Tempo.co contohnya, hanya berfokus kepada aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan megabaikan aspek politik. Tempo.co banyak mengkritik keputusan pemerintah yang tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 karena dinilai kontradiktif dengan kebijakan pencegahan penyebaran virus *COVID-19* yang telah dibuat sebelumnya. Tempo.co cenderung menginformasikan dampak-dampak negatif yang akan diterima masyarakat jika Pilkada 2020 tidak ditunda. Sofian dan Lestarini (2020) mengatakan bahwa, Tempo.co seringkali memuat berita yang menunjukkan ideologi dari media itu sendiri untuk menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Pada kasus ini bisa saja khalayak akan menerima berita tersebut sebagai bentuk kegagalan Pemerintah dalam menangani kasus pandemi *COVID-19* karena Tempo.co cenderung menonjolkan sikap pesimis dan ragu-ragu Pemerintah dalam menangani *COVID-19* di Indonesia. Pada kenyataannya, media tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang bisa

mempengaruhi isi berita, faktor tersebut antara lain, faktor rutinitas media, faktor organisasi, faktor ekstramedia, faktor individual, dan faktor ideologi. (Qolbi, 2018:86)

Tujuan pembentukan realitas media yang dilakukan Tempo.co yaitu untuk membangun opini publik bahwa Pilkada berdampak negatif bagi masyarakat jika diselenggarakan di tengah pandemi *COVID-19*. Seperti yang dijelaskan oleh Pardianto (2014) dalam jurnalnya bahwa, pada zaman modern fungsi jurnalistik bukan lagi menyampaikan informasi, tapi juga mendidik, dan mempengaruhi khalayak agar melakukan kegiatan tertentu. Upaya membentuk opini publik ini dilakukan Tempo.co dengan cara menyusun berita tentang polemik penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi berdasarkan sudut pandang dari pihak yang menolak diselenggarakannya Pilkada 2020. Hal ini bisa dilihat dalam artikel-artikel berita Tempo.co. Dalam artikel-artikel berita tersebut hampir semuanya hanya menggunakan satu narasumber. Narasumber tersebut seluruhnya menolak penyelenggaraan Pilkada 2020. Padahal, sebuah berita baru bisa dikatakan objektif apabila mampu menghadirkan dua pihak yang memiliki pendapat yang bertentangan dalam satu berita. Jadi, artikel-artikel berita Tempo.co belum bisa dikatakan sebagai berita yang objektif, karena di dalam artikel-artikel berita Tempo.co hanya menempatkan pihak yang menolak penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi *COVID-19*.

Pun demikian dengan Kompas.com. ia banyak memfokuskan pemberitaan pada aspek politik, dimana berita-berita Kompas.com cenderung berfokus pada persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Seperti dalam Jurnal yang ditulis oleh Hapsari (2021) juga membahas bagaimana Kompas.com menuliskan berita terkait pro-kontra penyelenggaraan Pilkada oleh beberapa pendapat tokoh, namun di akhir berita Kompas lebih menonjolkan pada pendapat Pro (mendukung) terhadap penyelenggaraan Pilkada. Bedanya, Kompas.com setidaknya sedikit berupaya netral dengan tidak mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat. Paling tidak menurut penulis, Kompas.com sedikit banyak mampu melakukan tugasnya sebagai media yang memberikan informasi netral dan berimbang. Meskipun, artikel berita yang ditemui lebih banyak bermain aman dengan condong ke arah dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020. Dalam Jurnal yang ditulis Nurhajati dan Wijayanto (2018) mengatakan bahwa Kompas.com kelihatan memiliki sikap yang tidak jauh berbeda dengan media lain, meski didukung banyak data, dan mampu mengkritik Pemerintah, namun prinsip main aman dan hati-hati sangat mendominasi di setiap bingkai pemberitaan. Kecenderungan Kompas.com pada penelitian ini mirip dengan pembahasan dari penelitian terdahulu yang sudah penulis cantumkan pada bab tinjauan pustaka. Dalam jurnal yang

ditulis oleh Boer, Pratiwi dan Muna (2020) pada bab pembahasan disebutkan bahwa, Kompas.com cenderung memberikan tempat pada Pemerintah dalam menyampaikan pendapat terkait salah satu aspek terbesar yang berpengaruh pada putusnya rantai penularan virus. Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Kompas.com memang memiliki kecenderungan terhadap pihak tertentu dalam hal ini Pemerintah.

Meskipun begitu, berita seharusnya tetap patuh dan sesuai dengan standar kelengkapan. Karena berita adalah peristiwa yang telah terjadi, maka dari itu realitas media, seperti Tempo.co dan Kompas.com tentu harus berusaha untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan mendekati realitas sebenarnya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menulis berita dengan lengkap beserta sumber-sumber dan informasi yang berimbang. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disinggung oleh Handayani dan Junaidi (2018) dalam jurnalnya yang menyebutkan, Berita-berita yang disajikan oleh portal media online tentunya harus memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat pada elemen jurnalisme sebagai upaya tanggung jawab terhadap kebebasan pers. Akan tetapi pada kenyataannya, keduanya gagal melakukan upaya tersebut. Sesuai dengan pendapat Juditha (2013) yang mengatakan, Sejalan dengan lajunya perkembangan media online yang tak terkendali, jurnalisme online selalu menjadi perhatian karena kerap dianggap tidak mengutamakan objektivitas (*akurasi, fairness, kelengkapan dan imparialitas*) karena berita hanya untuk mengejar kecepatan (hal. 145-154). Maka dari sini kita bisa sepakat bahwa media online memang memiliki kecenderungan terhadap pihak tertentu meskipun hanya samar-samar.

B. Tabel Perbandingan Antara Kedua Media

1. Framing Kebijakan COVID-19 Periode Juni-Desember 2020

Pada periode ini, kebijakan *COVID-19* yang di terapkan merupakan kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut adalah penerapan kebiasaan baru (*New Normal*). Kebijakan ini membuat masyarakat mulai menerapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru dalam beraktivitas sehari-hari.

Tabel 4.1

Periode Juni-Juli 2020			
No.	Struktur	Tempo.co	Kompas.com
1.	Sintaksis	KPK mengingatkan Pemerintah bahwa menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi <i>COVID-19</i> menimbulkan bahaya, bukan hanya bahaya bagi keselamatan masyarakat tapi juga rawan adanya kecurangan saat pemilihan. KPK mengatakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah dinilai tidak cocok untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Belum adanya regulasi terkait tahapan lebih lanjut pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi <i>COVID-19</i> menjadi alasan utamanya.	Menurut Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi. Pemerintah menilai pandemi <i>COVID-19</i> tidak ada yang bisa menjamin kapan akan berakhir. Selain itu, Pemerintah juga menyebutkan kemungkinan kerugian-kerugian yang akan dialami Indonesia jika Pilkada ditunda ke tahun berikutnya. Salah satunya anggaran untuk Pilkada akan terbuang sia-sia. Penerapan kebijakan <i>New Normal</i> menjadi alasan Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020.
2.	Skrip	Penulisan artikel pada Tempo.co menjelaskan secara lengkap terkait bahaya yang akan ditimbulkan jika Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi <i>COVID-19</i> . Namun, tidak ditemukan salah satu unsur skrip (<i>How</i>) di dalam artikel berita ini.	Penulisan artikel pada Kompas.com menjelaskan secara lengkap tekad Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu yang tetap melaksanakan Pilkada meskipun pandemi belum berakhir. Namun, tidak ditemukan salah satu unsur skrip (<i>How</i>) di dalam artikel berita ini.
3.	Tematik	Secara tematik pemberitaan pada artikel berita ini menuliskan fakta bahwa narasumber khawatir dengan potensi bahaya yang akan timbul saat Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi <i>COVID-19</i> , dan mengingatkan Pemerintah agar lebih memperhatikan situasi yang ada.	Secara tematik pemberitaan pada artikel berita ini menuliskan fakta bahwa narasumber bertekad untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 meskipun pandemi <i>COVID-19</i> belum berakhir. Penerapan kebijakan kebiasaan baru (<i>New Normal</i>) menjadi alasan utamanya. Selain itu karena tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi

			berakhir juga menjadi pertimbangan.
4.	Retoris	Tempo.co menggunakan gambar sampul dengan foto ilustrasi situasi disaat pemilihan suara berlangsung. Tepatnya foto jari kelingking yang dicelupkan ke dalam tinta ungu sebagai bukti telah melakukan pemungutan suara.	Kompas.com menggunakan gambar sampul yang menampilkan foto narasumber pada artikel berita.
Periode September-Oktober 2020			
No.	Struktur	Tempo.co	Kompas.com
1.	Sintaksis	Dalam beberapa artikel berita tersebut disebutkan bagaimana ketidakmampuan Pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dari sisi regulasi dan tindakan. Teknis dan manajemen pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi nyatanya tidak diatur dalam undang-undang Pilkada yang berlaku. Banyak kubu yang menyarankan agar Pilkada 2020 ditunda saja karena situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda. Tetapi Pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilu tetap teguh dengan pendiriannya, karena mereka menganggap pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Pemerintah ingin mencontoh negara lain yang sukses menggelar pemilihan di tengah pandemi.	Dalam beberapa artikel berita tersebut disebutkan bagaimana Pilkada 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 menuai Pro dan Kontra dari berbagai kalangan. Meskipun ditolak oleh bermacam-macam pihak namun Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu telah sepakat bahwa Pilkada 2020 tidak akan ditunda. DPR sendiri mencontohkan bagaimana negara lain dapat dengan sukses menggelar Pilkada meskipun pandemi masih berlangsung. Alasan Pemerintah masih tetap sama yaitu tidak ada yang bisa mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Pemerintah juga menyebutkan urgensi pelaksanaan Pilkada salah satunya, untuk memacu perekonomian di tengah krisis COVID-19.
2.	Skrip	Penulisan beberapa artikel berita tersebut lebih banyak menonjolkan unsur (<i>Why</i>) dan (<i>Who</i>) Tempo.co menjelaskan dengan lengkap terkait sikap penolakan yang diutarakan	Penulisan beberapa artikel berita tersebut lebih banyak menonjolkan unsur (<i>Why</i>) dan (<i>Who</i>) Kompas.com menjelaskan dengan lengkap terkait sikap Pemerintah yang

		para narasumber. Tempo.co juga cenderung menggunakan narasumber yang bukan dari kalangan Pemerintah, DPR, atau Penyelenggara Pemilu. Pada beberapa artikel juga tidak ditemukan unsur (<i>How</i>).	tetap menggelar Pilkada meskipun kasus <i>COVID-19</i> masih tinggi. Kompas.com juga cenderung menggunakan narasumber yang dari kalangan Pemerintahan, meskipun ada beberapa artikel yang juga mencantumkan narasumber dari pihak berlawanan. Pada beberapa artikel juga tidak ditemukan unsur (<i>How</i>).
3.	Tematik	Secara tematik pemberitaan pada artikel berita ini menuliskan dengan tegas fakta bahwa kekacauan pada tahapan Pilkada menjadi bukti bahwa Pemerintah tidak siap dalam mengatasi penyebaran <i>COVID-19</i> dari sisi regulasi dan tindakan. Banyaknya pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dan juga penolakan dari berbagai pihak tetap tidak membuat Pemerintah berubah pikiran dan menunda Pilkada. Sebaliknya, Pemerintah malah mencontohkan sejumlah negara yang tetap menggelar pemilihan di tengah wabah.	Secara tematik pemberitaan pada artikel berita ini menuliskan fakta bahwa negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan yang berhasil menggelar Pemilu di tengah pandemi <i>COVID-19</i> membuat Pemerintah Indonesia juga ingin mengikuti jejak mereka. Selain itu, dijelaskan pula poin-poin urgensi yang mendorong penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Dua diantaranya yaitu wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi, dan untuk memacu perekonomian Indonesia di tengah krisis <i>COVID-19</i> .
4.	Retoris	Tempo.co banyak menggunakan gambar sampul dengan foto ilustrasi situasi disaat pemilihan suara berlangsung. Namun pada beberapa artikel Tempo.co juga menggunakan foto narasumber sebagai sampul.	Kompas.com banyak menggunakan foto narasumber sebagai sampul artikel, dan sesekali menggunakan gambar ilustrasi situasi saat pemungutan suara. Tepatnya foto tangan yang sedang memegang surat suara.
Periode November-Desember 2020			
No.	Struktur	Tempo.co	Kompas.com
1.	Sintaksis	Dalam berberapa artikel berita tersebut disebutkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal tersebut tidak lepas	Dalam berberapa artikel berita tersebut disebutkan bagaimana upaya Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu menyiapkan strategi khusus

		<p>dari kesadaran masyarakat terhadap aspek resiko penyelenggaraan Pilkada 2020. Meskipun sebelumnya, pelanggaran protokol kesehatan masih marak terjadi pada saat tahapan kampanye berlangsung. Bahkan Bawaslu sempat merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020 dari aspek pandemi. Anggota Perludem mensyukuri penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dengan ketat oleh masyarakat dan juga petugas TPS, sehingga Pilkada 2020 berjalan lancar dan sukses dilaksanakan.</p>	<p>menjelang dilaksanakannya Pilkada 2020. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah cukup khawatir dengan minimnya partisipasi publik dikarenakan pandemi <i>COVID-19</i>. Sehingga disiapkan strategi-strategi khusus agar masyarakat tidak khawatir untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suara. Pada akhirnya Pilkada 2020 berjalan dengan lancar dan sukses dilaksanakan. Kompas.com juga merangkum perjalanan Pilkada 2020 dari ditentang oleh berbagai kalangan, hingga sukses dilaksanakan.</p>
2.	Skrip	<p>Penulisan beberapa artikel berita pada Tempo.co lebih banyak menonjolkan unsur (<i>Why</i>) dan (<i>Who</i>). Namun, sangat sedikit ditemukan unsur (<i>How</i>).</p>	<p>Penulisan beberapa artikel berita tersebut lebih banyak menonjolkan unsur (<i>Why</i>) dan (<i>Who</i>). Namun, dari tiga artikel berita, hanya satu artikel ditemukan unsur (<i>How</i>).</p>
3.	Tematik	<p>Secara tematik pemberitaan pada artikel berita ini menuliskan fakta bahwa pelanggaran protokol kesehatan masih sering terjadi, bahkan beberapa minggu sebelum Pilkada 2020 dilaksanakan. Pelanggaran protokol kesehatan banyak terjadi pada saat tahapan kampanye. Akan tetapi, pada akhirnya Pilkada 2020 berjalan lancar dan sukses berkat masyarakat dan petugas TPS yang menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat saat pemungutan suara berlangsung.</p>	<p>Secara tematik pemberitaan pada artikel berita ini menuliskan fakta bahwa Pemerintah juga khawatir partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 akan minim. Hal tersebut dikarenakan pandemi yang belum berakhir akan membuat masyarakat enggan untuk datang ke TPS. Untuk mengatasinya, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu menyiapkan strategi khusus agar masyarakat mau untuk datang dan menggunakan hak suaranya. Menjelang dilaksanakannya Pilkada, artikel pada Kompas.com memiliki kalimat penutup yang sama, yaitu mengingatkan masyarakat kapan dan dimana Pilkada akan diselenggarakan.</p>

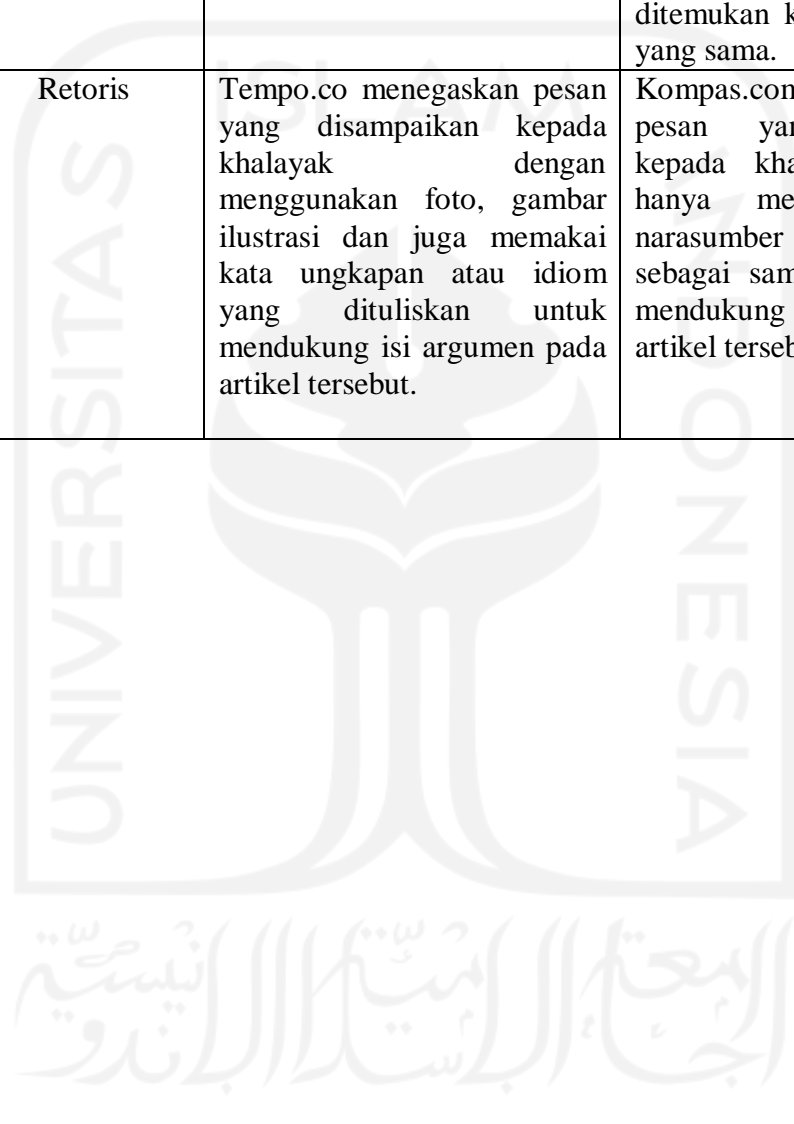
4.	Retoris	Tempo.co banyak menggunakan gambar sampul dengan foto narasumber sebagai sampul dan satu artikel menggunakan foto ilustrasi situasi pemungutan suara yang mana menampilkan petugas TPS menggunakan atribut kesehatan lengkap.	Kompas.com banyak menggunakan gambar sampul dengan foto narasumber sebagai sampul dan salah satu artikel menggunakan gambar ilustrasi berupa kotak suara.
----	---------	---	---

2. Perbandingan antara kedua media

Tabel 4.2
Perbandingan Tempo.co dan Kompas.com Berdasarkan Unsur Framing

No.	Struktur	Tempo.co	Kompas.com
1.	Sintaksis	Dengan memperhatikan format penulisan judul dan lead berita, Tempo.co lebih intens dengan penekanan judul yang menunjukkan banyaknya penolakan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dari berbagai pihak. Narasumber yang digunakan Tempo.co lebih banyak berasal dari Lembaga Non-Pemerintah, Pengamat Politik, dan Aliansi Kelompok Masyarakat yang cenderung menolak penyelenggaraan Pilkada 2020.	Pada bagian judul dan lead berita, Kompas.com mendeskripsikan isi berita yang disampaikan kepada pembaca secara tegas dan juga jelas. Kompas.com lebih banyak memberikan penekanan makna berita pada penjelasan terkait pentingnya Pilkada di tengah pandemi. Narasumber yang digunakan Kompas.com cenderung dari kalangan Pemerintahan, DPR, Penyelenggara Pemilu. Meskipun ada beberapa artikel yang menyertai narasumber dari Tokoh Masyarakat yang bertentangan.
2.	Skrip	Penulisan artikel pada Tempo.co banyak yang tidak sesuai dengan unsur 5W+1H karena dalam beberapa artikel berita tidak ditemukan salah satu unsur dalam struktur skrip yaitu (<i>How</i>).	Penulisan artikel pada Kompas.com banyak yang tidak sesuai dengan unsur 5W+1H karena dalam beberapa artikel berita tidak ditemukan tidak terdapat salah satu unsur dalam struktur skrip yaitu (<i>How</i>).

3.	Tematik	Tema diperkuat dengan <i>headline</i> , <i>lead</i> dan pernyataan dari narasumber. Tempo.co lebih banyak membahas tentang penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi melalui pendapat-pendapat dari berbagai pihak non-pemerintah.	Tema diperkuat dengan <i>headline</i> , <i>lead</i> dan pernyataan dari narasumber. Kompas.com lebih banyak membahas tentang pendapat Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu terkait pentingnya penyelenggaraan Pilkada 2020 merkipun di tengah pandemi. Pada beberapa artikel juga ditemukan kalimat penutup yang sama.
4.	Retoris	Tempo.co menegaskan pesan yang disampaikan kepada khalayak dengan menggunakan foto, gambar ilustrasi dan juga memakai kata ungkapan atau idiom yang dituliskan untuk mendukung isi argumen pada artikel tersebut.	Kompas.com menegaskan pesan yang disampaikan kepada khalayak cenderung hanya menggunakan foto narasumber yang ditampilkan sebagai sampul artikel untuk mendukung isi argumen pada artikel tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perbandingan kedua media setelah melalui analisis framing model *Zhongdang Pan* dan *Gerald M. Kosicki*, penulis menemukan adanya perbedaan dalam penyajian beritanya. *Tempo.co* membingkai penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi dapat membahayakan keselamatan masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kompas.com* menganggap penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi bukan masalah yang besar dan sudah disepakati oleh Pemerintah, DPR, serta Penyelenggara Pemilu.

Dilihat dari pengemasan berita, kedua media sangat berbeda. *Tempo.co* memberikan kesan kepada pembaca bahwa Pemerintah tidak memperhatikan aspek kesehatan ketika ingin menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah krisis pandemi *COVID-19*, karena dapat membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kompas.com* melihat pemberitaan ini sebagai upaya Pemerintah dalam menghindari konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan *COVID-19*. Setelah dilakukan analisis dengan merangkum berita dari setiap edisi, memang terlihat sangat jelas perbedaan dari kedua media online tersebut.

Secara sintaksis, *Tempo.co* menggambarkan bahwa Pilkada 2020 tidak seharusnya diselenggarakan di saat pandemi *COVID-19* masih berlangsung. Pilkada sangat identik dengan kerumunan massa, karena itu penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan *Kompas.com* yang menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada demi menekan potensi kerugian yang akan dialami Indonesia. Pemerintah menjamin keamanan Pilkada 2020 jika dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Secara skrip, dapat disimpulkan bahwa kedua media berbeda dalam mengisahkan fakta. *Tempo.co* lebih cenderung mengisahkan penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi. *Tempo.co* umumnya hanya menggunakan satu narasumber dan narasumber tersebut biasanya bukan dari pihak Pemerintahan maupun Penyelenggara Pemilu. Sedangkan *Kompas.com* mengisahkan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu dalam merealisasikan Pilkada 2020.

Kompas.com lebih banyak menampilkan narasumber dari pihak Pemerintahan ataupun dari Penyelenggara Pemilu.

Secara tematik dan retorik, kedua media juga memiliki perbedaan dalam penyampaian kepada pembaca. Tempo.co memberikan informasi bahwa Pilkada 2020 mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Sedangkan Kompas.com memberikan informasi bahwa Pilkada 2020 sangat penting dilakukan meskipun pandemi *COVID-19* belum berakhir. Dengan diselenggarakannya Pilkada maka Indonesia akan terhindar dari potensi kerugian yang lebih besar, baik itu kerugian politik maupun kerugian ekonomi.

B. Keterbatasan Penelitian

a) Keterbatasan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua portal media online, yaitu Tempo.co dan Kompas.com, untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian pbingkaiian pemberitaan media akan lebih baik jika menggunakan lebih banyak media atau juga menambahkan media cetak. Selain itu juga keterbatasan waktu penelitian yang terikat konteks penanganan *COVID* oleh Kemenkes di masa pemberitaan yg diteliti.

b) Keterbatasan Metode

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan analisis framing model *Zhongdang Pan* dan *Gerald M. Kosicki*. Karena kondisi pandemi, pengumpulan data hanya menggunakan kedua portal media online sebagai sumber data utama. Karena banyaknya berita yang tersedia sehingga membuat penulis memakan waktu cukup lama untuk mengelompokkan judul berita yang relevan dengan penelitian, namun dapat terbantu dengan menggunakan kata kunci.

C. Rekomendasi

a) Rekomendasi Akademik

Agar penelitian ini berkembang, dapat menggunakan teori lain seperti teori bias media supaya bisa lebih luas. Sehingga ketika meneliti penelitian dengan tema yang sejenis, dapat mengetahui sejauh mana ideologi media bisa berpengaruh dalam penyampaian berita kepada khalayak. Pada penelitian ini penulis hanya memakai dua portal media online, dan untuk penelitian di masa

akan datang jauh lebih baik apabila dapat menambahkan media massa lain seperti media cetak agar objek bisa lebih luas.

b) Rekomendasi Praktis

- a. Dalam penyajian sebuah berita, media dan wartawan semestinya menyampaikan berita secara seimbang dan tidak memihak pada salah satu pihak.
- b. Pernyataan narasumber yang digunakan haruslah dari dua pihak yang bersebrangan sehingga pemberitaan yang dilakukan menjadi netral dan tidak memihak.

c) Rekomendasi Sosial

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih berita dan lebih kritis dalam memaknai pesan yang disampaikan dalam berita. Masyarakat sebaiknya mengumpulkan berbagai informasi untuk mengetahui kebenaran dari sebuah berita dan tidak langsung memercayai berita yang dibaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cangara, H. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djoko S. 2014. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Gramedia
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.
- Keller, A. 2009. *Tantangan dari Dalam (Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika)*. Jakarta: FES Indonesia.
- Romli, A.S.M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Anggoro, Ayub Dwi. 2014. *MEDIA, POLITIK, dan KEKUASAAN (Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV)*. Jurnal Aristo. 2014. Vol.2. No.2.
- Arum Hapsari, D. 2021. *Wacana Pro Kontra Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19 pada Pemberitaan Online*. Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 2021. Vol.3. No.2. Hal. 140-148.
- Bahanan, Umar Fauzi. 2020. *Campaign Team and Media Agenda in The News of Simultaneous Regional Elections During The Pandemic in 2020*. Journal of Social Political Sciences. 2020. Vol.1. No.4.
- Boer, K.M. Pratiwi, M.R. Muna, N. 2020. *Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait COVID-19 di Media Online*. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi. 2020. Vol.4. No.1:85-104.
- Handayani, E.S. Junaidi, A. 2018. *Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden 2019 di Media Siber dan Penerapan Elemen Jurnalisme (Analisis Framing Pada Okezone.com dan Suara.com)*. Koneksi. 2018. Vol.2. No.2, Hal. 321-328.
- Hayati, H.N. Yoedtadi, M.G. 2020. *Konstruksi Berita COVID-19 di Kompas.com dan Tribunnews.com*. Koneksi. 2020. Vol.4. No.2:243-250.
- Juditha, Christiany. 2013. *Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi di Portal Berita Detiknews)*. Jurnal Pekommas. 2013. Vol.16. No.3:145-154.

- Landman, T. Splendore, Luca Di Gennaro. 2020. *Pandemic Democracy: Elections and COVID-19*. Journal of Risk Research. 2020. Vol.23. Nos.7-8.
- Malik, R. Sultan, M Iqbal. Kahar. 2017. *Konstruksi Realitas Pemilukada di Media Online (Analisis Framing Berita Tribun Timur Online Tentang Pemilukada Kabupaten Takalar)*. Jurnal Komunikasi KAREBA. 2017. Vol.6 No.2 Juli Desember.
- Marisal, H. Pornauli, A. Indra, A & Aurora, A. 2020. *The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection*. Journal of Election and Leadership (JOELS). 2020.
- Musfialdy. 2015. *Peran Media Massa saat Pemilihan Umum Mengawasi atau Diawasi*. Jurnal RISALAH. 2015. Vol.26. No.2:69-76.
- Nurhajati, L & Wijayanto, X. 2018. *Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak*. Jurnal Adhyasta Pemilu. 2018. 1. 43-54.
- Pardianto. 2014. *Analisis Framing Pemberitaan Pilkada Maluku di harian Ambon Express dan Rakyat Maluku*. Jurnal Komunikasi Islam. 2014. Vol.04. No.02. Desember.
- Prasetya, D. Hadi, I.P. Wijayanti, C.A. 2020. *Analisis Framing Pemberitaan Sandiwara Uno di Detik.com dan Tempo.co*. Jurnal E-Komunikasi. 2020. Vol.7, No.2.
- Sofian, A. Lestari, N. 2021. *Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kasus COVID-19 (Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Media Online Koran.Tempo.co Edisi Maret 2020)*. COMMICAST. 2021. Vol.2. No.1:58-70.
- Sutrisno, C. 2017. *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. 2017. Vol.2. No.2:38-50.

Skripsi

- Qolbi, Z. 2018. *Konstruksi Media Cetak Lokal Menjelang Pilkada 2018 (Analisis Framing Model Robert Entman terhadap Pemberitaan Menjelang Pilgub Jawa Tengah dan Pilbup Banyumas di Radar Banyumas dan Satelit Post)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Website

Profil Kompas

<https://korporasi.kompas.id/profil/cerita-berdiri/> , (Diakses pada tanggal 10 Februari 2021)

Profil Kompas.com

<https://inside.kompas.com/about-us> , (Diakses pada tanggal 10 Februari 2021)

Profil Tempo.co

<https://www.tempo.id/corporate.php#tempo> , (Diakses pada tanggal 10 Februari 2021)

Situasi COVID-19 (Kumulatif)

<https://www.covid19.kemkes.go.id/> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2021)

Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

<https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/> , (Diakses pada tanggal 14 Februari 2021)

Pemerintah Bersikeras Menyelenggarakan Pilkada 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1389124/mahfud-md-jelaskan-4-alasan-pemerintah-ngotot-pilkada-2020-jalan-terus>, (Diakses pada tanggal 23 Juni 2021)

Data AC Nielsen Tentang Pembaca Berita Online

<https://katadata.co.id/ekarina/brand/5fcfc332efab0/transformasi-bisnis-media-di-era-digital-terus-bergulir>, (Diakses pada tanggal 23 Juni 2021)